

**PENGARUH TINGKAT UPAH MINIMUM PROVINSI DAN  
TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PENGANGGURAN  
DI INDONESIA**

**NEVI NOOR ANANDA  
8125072759**



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Jakarta**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
KONSENTRASI PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI  
JURUSAN EKONOMI & ADMINISTRASI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2012**

**INFLUENCE OF THE PROVINCIAL MINIMUM WAGE  
RATER AND EDUCATION LEVELS OF UNEMPLOYMENT  
IN INDONESIA**

**NEVI NOOR ANANDA  
8125072759**



**This Skripsi is Written to Fulfill Part of the Requirements to Getting Bachelor  
of Educational Degree at Faculty of Economic  
State University of Jakarta**

**STUDY PROGRAM OF ECONOMIC EDUCATION  
MAJOR IN ECONOMIC COOPERATION EDUCATION  
DEPARTEMENT OF ECONOMIC AND ADMINISTRATION  
FACULTY OF ECONOMIC  
STATE UNIVERSITY OF JAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

**NEVI NOOR ANANDA.** Pengaruh antara Tingkat Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pendidikan terhadap Pengangguran di Indonesia Skripsi. Jakarta : Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2012.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan data dan fakta yang sah, benar dan dapat dipercaya apakah terdapat Pengaruh antara Tingkat Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan terhadap Pengangguran di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan selama periode waktu 3 tahun dihitung sejak tahun 2007-2009 di 21 provinsi melalui data sekunder. Sehingga data berjumlah 63. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *expos facto* dengan jenis data panel yaitu penggabungan antara data *cross section* dan *time series*.

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan pada 21 Propinsi. Pada instrumen variabel Y (Pengangguran) X1(tingkat upah) X2(Tingkat Pendidikan) yakni nilai  $F_{hitung}$  lebih besar daripada nilai  $F_{tabel}$ . Sehingga  $H_0$  ditolak, dengan tingkat signifikansi 0,017 dan lebih kecil daripada 0,05% dan berarti bahwa seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Pada teknik analisis data diperoleh nilai persamaan regresi sebesar  $Y = 9,1980,061X_1 + 0,367X_2 + et$  Pada pengujian persyaratan analisis untuk menguji normalitas Uji statistic yang dapat digunakan dalam uji normalitas adalah uji kolmogorov-smirnov test data yang berdistribusi normal Dalam uji hipotesis digunakan uji F dan menunjukkan bahwa secara bersama-sama UMP dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran terbuka.  $F_{hitung}$  sebesar 4.346 lebih besar dr  $F_{tabel}$  1,53 dengan signifikansi 0,017. karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Maka  $H_0$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan UMP dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran tingkat upah menghasilkan  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,103 <$  dari  $t$  tabel sebesar 1,667, ( $df$ ) $n-k-1=59$  karena  $t_{hitung} <$   $t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara ump dengan pengangguran tingkat pendidikan menghasilkan  $t_{hitung}$  sebesar  $2,905 >$  dari  $t$  tabel sebesar 1,667, sehingga jika variabel maka  $H_0$  ditolak artinya tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia

$R^2$  (*R square*) sebesar 0,127 atau (12,7%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 12,7%. Uji asumsi klasik nilai Durbin Watson adalah sebesar 1.550 disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada uji durbin watson. Pada multikolinearitas kedua variabel independen memiliki nilai tolerance sebesar 0,958 berada dibawah 1 dan nilai VIF sebesar 1.044 jauh dibawah angka 10.

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap pengangguran di Indonesia.

## ***ABSTRACT***

**NEVI NOOR ANANDA.** Influence Of The Provincial Minimum Wage Rater and Education Levels Of Unemployment In Indonesia Thesis. Jakarta: Economics Education Studies Program, Concentration of Economic and Cooperative Education. Department of Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2012.

This study aims to gain knowledge based on data and facts are valid, correct and reliable whether there is influence of the Minimum Wage Rate of Unemployment and Educational Attainment in Indonesia.

The research was conducted over a period of 3 years commencing from the year 2007-2009 in 21 provinces through secondary data. So that the data amount to 63. The method used is *expos facto* method with panel data types, namely the incorporation of cross section data and time series.

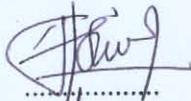
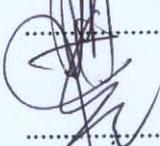
Based on the results of trials conducted in 21 provinces. On the instrument variables Y (Unemployment) X1 (wage rate) X2 (Education Rate) that is greater than the value  $F_{hitung}$   $F_{tabel}$  value. So  $H_0$  is rejected, with a significance level of 0.017 and less than 0.05% and means that all independent variables have a significant influence on the dependent variable *san*.

In the data analysis techniques derived values for the regression equation  $Y = 9,1980,061 + 0.367 X_1 + X_2$  et In the testing requirements analysis to test the normality of the test statistic that can be used in the test for normality is the Kolmogorov-Smirnov test normally distributed data are used in hypothesis testing F test and demonstrate that together UMP and education levels have a significant effect on unemployment. 4346 for greater  $F_{hitung}$  dr  $F_{tabel}$  1.53 with a significance of 0.017. Because the significance is smaller than 0.05 or 5%. Then  $H_0$  is rejected, so it can be concluded UMP and education levels have a significant effect on the unemployment rate of wages produces  $t_{count} -0.103 < 1.667$  at the table of t, ((df)  $n_k - 1 = 59$ ) because  $t_{count} < T_{Table}$  then  $H_0$  is accepted, meaning that the partial no significant effect between the UMP with unemployment levels of education produce  $t_{count} 2.905 > 1.667$  for a table of t, so that if the variable is rejected then the  $H_0$  mean level of education is partially significant effect on unemployment in Indonesia.

$R^2$  (R square) of 0.127 or (12.7%). This shows that the percentage contribution of the influence of the independent variable (UMP and TKPend) against the dependent variable (unemployment) of 12.7%. Test classic assumptions Durbin Watson value is equal to 1550 concluded that there is no autocorrelation problem in the second test variable multicollinearity Durbin watson. In independently has a value tolerance of 0.958 is below 1 and VIF value for 1044 is far below the number 10. It can be concluded that all the variables used are wage rates, education levels and unemployment, it can be concluded that there was a significant effect of minimum wage rates and education levels of unemployment in Indonesia.

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si</u> NIP. 197201141998022001	Ketua		07/12 .....
2. <u>Dicky Iranto, SE, M.Si</u> NIP. 197106122001121001	Sekretaris		03/12 .....
3. <u>Dr. I Ketut R Sudiarditha, M.Si</u> NIP. 197201141998022001	Penguji Ahli		08/12 .....
4. <u>Sri Indah Nikensari, S.E, M.E</u> NIP: 19620809 199003 2 001	Pembimbing I		07/12 .....
5. <u>Dr. Saparuddin, Msi</u> NIP: 197701152005011001	Pembimbing II		06/12 .....

Tanggal Lulus: 30 Januari 2012

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 8 Februari 2012

Yang membuat pernyataan



Nevi Noor Ananda

No. Reg: 8125072759

## LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Pengetahuan diperoleh dengan belajar, kepercayaan didapat dengan keraguan, keahlian dengan latihan, dan cinta diraih dengan cinta."*

*\_Thomas S Szasz, psikolog Hungaria\_*

*"Penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi menjadi seperti apa dia dengan kerja kerasnya itu."*

*\_John Ruskin, penulis (1819–1900), arsitek dan kritikus seni asal Inggris\_*

*Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini teruntuk Mama, Bapak, Rusana Marfiani Putri, Naning Trias Wuri, Fedri Yunizar, widiya Ayusita Resmi, Nurul Annisa, beserta orang-orang yang aku sayangi serta menyayangiku, Doa restu, perhatian, dan kasih sayang mereka adalah motivasi terbesar bagi saya. Terima kasih untuk kamar kost, laptop, warnet sebagai saksi bisu perjuangan ini, dan perpustakaan sebagai rumah kedua sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan izin-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul “Pengaruh antara Tingkat upah dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran di Indonesia.”

Skripsi ini dibuat untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Konsentrasi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Ibu Sri Indah Nikensari, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing I.
2. Bapak Dr. Saparuddin M.Si selaku dosen pembimbing II dan selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi
3. Ibu Siti Nurjanah selaku Ketua konsentrasi pendidikan ekonomi koperasi
4. Bapak Ari Saptono, S.E., M.Pd selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi.
5. Ibu Dra. Nurahma Hajat, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
6. Kementrian tenaga kerja dan transmigrasi
7. Badan Pusat Satatistik
8. LIPI

9. Fedri Yunizar, Nurul Anissa, Widiya Ayu Sita Resmi, Gilang Aghistya Ramadhan, Surengga wijaya, Cipto prayitno, Tubagus Mulyana, Rusana Marfiani Putri, Naning Trias Wuri, Dini Fetriani, Noer Azzesah, Reshty Sudaryat, dan Nita Lestiani, yang telah memotivasi penulis dan selalu membantu penulis dalam semua bidang.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Secara khusus, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua (mama dan bapak), yang telah memberikan restu, dukungan moril dan materil, kasih sayang, dan doa yang tulus serta kesabarannya.

Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik maupun komentar dari pembaca sebagai masukan yang dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.

Jakarta, Januari 2012

Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Pembatasan Masalah .....	6
D. Perumusan Masalah .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II PENYUSUNAN DESKRIPSI TEORETIS, KERANGKA BERPIKIR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS</b>	
A. Deskripsi Teoretis	
1. Pengangguran.....	8
2. Tingkat Upah Minimum .....	20
3. Tingkat Pendidikan .....	39
2.1 Riview Penelitian Terdahulu .....	50
B. Kerangka Berpikir .....	55
C. Perumusan Hipotesis .....	56
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Tujuan Penelitian.....	57
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	58

C. Metode Penelitian .....	58
D. Jenis dan Sumber Data .....	59
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	59
G. Konstelasi pengaruh antar variabel.....	61
H. Teknik Analisis Data	
1. Persamaan Regresi .....	61
2. uji koefisien regresi (parsial) dengan uji t .....	62
3. uji koefisien regresi keseluruhan dengan uji F .....	62
I. Uji koefisien korelasi .....	63
J. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	63
K. Uji Asumsi klasik	
a. uji Multikolinearitas .....	64
b. uji Heteroskedastisitas .....	66
c. uji Autokorelasi .....	66
d. uji Normalitas.....	68
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi data	
1.Data Tingkat Upah Minimum.....	69
2.Data Tingkat Pendidikan.....	71
3.Data Pengangguran .....	75
B. Analisis Data	
1. model utama.....	76
2. model persamaan (perbaikan masalah autokorelasi) .....	83
C. Interpretasi Data .....	87
D. Keterbatasan penelitian .....	89
<b>BAB V KESIMPULAN,IMPLIKASI,SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	90
B. Implikasi.....	92
C. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN .....	98
RIWAYAT HIDUP .....	115

## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
II.1	Jumlah pengangguran terbuka di 24 provinsi .....	11
II.2	UMP Tahun 2007-2009 .....	38
II.3	Jumlah lulusan (SD-UNIVERSITAS) Tahun 2007.....	47
II.4	Jumlah lulusan (SD-UNIVERSITAS)Tahun 2008.....	48
II.5	Jumlah lulusan (SD-UNIVERSITAS)Tahun 2009.....	49
IV.3	Jumlah lulusan Tingkat pendidikan tinggi Tahun2007 .....	72
IV.4	Jumlah lulusan Tingkat pendidikan tinggi Tahun2008.....	73
IV.5	Jumlah lulusan Tingkat pendidikan tinggi Tahun2009.....	74
IV.6	Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2007-2009 .....	76
IV.7	Persamaan Regresi .....	76
IV.8	Uji Kolmogorov smirnov.....	79
IV.9	Uji t .....	81
IV.10	Uji F .....	81
IV.11	Koefisien korelasi parsial .....	82
IV.12	Hasil Analisis determinasi .....	83
IV.13	Uji Durbin Watson.....	84
IV.14	Hasil uji Multikolinearitas .....	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
II.1	Diagram penduduk berdasarkan usia.....	9
II.2	Penetapan upah minimum di pasar tenaga kerja.....	28
IV.1	Grafik Histogram .....	80
IV.2	Normal Probability .....	80
IV.3	Uji Heteroskedastisitas .....	86

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1.	Data Pengangguran, UMP,PT.....	98
2.	Data UMP 2007-2009.....	101
3.	Data jumlah lulusan SD-PT 2007-2009.....	102
4.	Pengangguran terbuka provinsi tahun 2007-2009.....	107
5.	Perhitungan model utama regresi dan uji asumsi klasik.....	110

## RIWAYAT HIDUP



Bernama Lengkap Nevi Noor Ananda, Lahir di kota Bogor pada tanggal 28 November 1988. Anak kedua dari tiga bersaudara yakni Rusana Marfiani putri (kakak) dan Naning Trias Wuri (adik) dari Pasangan Rusmiyatun dan Mujiharjo. Beragama muslim dan bertempat tinggal di Jalan Mayjend HE Sukma no 78 desa Teluk Pinang kecamatan Ciawi kabupaten Bogor. Beragama muslim dan Tamat sekolah taman kanak-kanak pada tahun 1993 di Taman kanak-kanak Perisna, menamatkan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2000 di SD NEGERI Teluk Pinang 01 Ciawi Bogor, menamatkan pendidikan lanjutan tingkat pertama pada tahun 2004 di SLTP NEGERI 2 Ciawi Bogor, menamatkan pendidikan menengah pertama pada tahun 2007 di SMA NEGERI 1 Cigombong Bogor, dan pada tahun 2012 menyelesaikan pendidikan sarjana strata 1 pada UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA jurusan ekonomi administrasi, program studi pendidikan ekonomi, konsentrasi pendidikan ekonomi koperasi, pada fakultas ekonomi. kemudian saat ini menjadi staf pengajar mata pelajaran Kewirausahaan dan kewarganegaraan di SLTP NEGERI SATU ATAP Caringin dan SMK BHAKTI CHANDRA Caringin Bogor, pengajar privat. Mempunyai hobi membaca buku-buku pshycolog dan islami, make up artis, musik, film horror dan komedi, berpetualang dan motivasi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi, akan tetapi sifatnya tidak sama dengan faktor-faktor produksi yang lain. Faktor produksi sumber daya alam dan modal misalnya, dapat saja dalam periode tertentu tidak dimanfaatkan dan juga kelebihan sumber alam dan modal tidak mengurangi pendapatan masyarakat. Akan tetapi tenaga kerja sebagai faktor produksi tidak dapat dibiarkan untuk tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dikehendaki adanya kelebihan tenaga kerja. Sebab tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan atau yang berlebihan akan menjadi beban bagi masyarakat yang bekerja, dan ini akan membatasi rata-rata pendapatan. Oleh karena itu faktor tenaga kerja selain sangat berhubungan dengan pendapatan masyarakat juga mempunyai konsekuensi sosial dan politik dalam suatu negara.

Problem pengangguran terbuka di Indonesia masih belum bisa diatasi oleh pemerintah. Sepanjang 2009-2010, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) hanya mampu menurunkan 1,5 persen dari total pengangguran /tahun. Memasuki 2011 pengangguran terbuka sekarang ada pada angka 9,25 juta. Program baru pun disusun Kemenakertrans yakni bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam menyebarkan informasi lowongan kerja.

Masalah tenaga kerja terutama pengangguran di Indonesia berkaitan sangat erat dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk, struktur umur, persebaran penduduk/ urbanisasi, pendidikan dan keterampilan, yang merupakan aspek suplai, serta pertumbuhan pendapatan dan produktivitas tenaga kerja, yang merupakan aspek permintaannya. Dalam hal ini perhatian ditujukan disamping kepada persediaan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan pembangunan dan permintaan tenaga kerja yang merupakan ukuran kelebihan atau kekurangan dari yang dibutuhkan dalam suatu sistem ekonomi.

Beberapa penulis (seperti Mazumar, 1981; United Nation, dan Edwards 1974) menyatakan bahwa ukuran pengangguran tidak begitu berarti di Negara sedang berkembang, namun bagi Negara-negara industri maju merupakan salah satu penyebab utama dari kemiskinan. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) dalam masyarakat sedang berkembang dapat saja tercatat sangat rendah meskipun terdapat kesenjangan yang besar antara persediaan tenaga kerja dan banyaknya kesempatan untuk pekerjaan produktif. Hal ini menurut United Nation (1998) disebabkan karena mereka yang seharusnya sebagai penganggur terbuka dalam sistem ekonomi maju, di NSB tersebar sebagai pekerja dengan berbagai bentuk pengangguran tersembunyi (*invisible unemployment*), setengah pengangguran (*underemployment*), atau pemanfaatan tenaga kerja yang tidak penuh (*labour underutilization*). Oleh karena itu beberapa penulis (dalam Squire, 1981: 68-69, 77) menyatakan bahwa dalam mempelajari pengangguran terbuka maka bentuk-bentuk *underemployment* tersebut diatas berfungsi sebagai ukuran tambahan. Selanjutnya dinyatakan oleh Squire bahwa taksiran-taksiran

pengangguran dapat dipandang sebagai indikator ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja dan underemployment sebagai ukuran kemiskinan. Jadi dapat dikatakan bahwa perubahan pengangguran untuk semua bentuk merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, sehingga penting untuk dipelajari permasalahannya di Indonesia.<sup>1</sup>

Jumlah penduduk yang tinggi di Negara sedang berkembang seperti Indonesia mempunyai sisi positif dan negatif dalam hal masalah ketenagakerjaan, sisi positifnya adalah jika jumlah penduduk yang tinggi tetapi dibarengi dengan produktivitas yang tinggi maka akan menguntungkan Negara itu sendiri tetapi jika sebaliknya, jumlah penduduk yang tinggi namun tidak dibarengi dengan produktivitas yang dapat diukur dari tingkat pendidikan salah satunya maka akan menjadi masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan serta akan menjadi beban bagi pemerintah. Maka dari itu pemerintah perlu memikirkan bagaimana caranya menggunakan semaksimal mungkin atau memberdayakan tenaga kerja penuh dari jumlah penduduk yang besar tersebut, agar masalah seperti pengangguran dapat teratasi diseluruh provinsi di Indonesia. Kemudian dilihat dari jumlah penduduk, banyak ulasan yang ditujukan pada usaha-usaha untuk menggambarkan keseimbangan pasar tenaga kerja melalui jumlah penduduk yang menganggur dengan pendekatan konsep “angkatan kerja” di Negara-negara agraris seperti Indonesia. Misalnya bahwa persediaan tenaga kerja, dalam hal ini persediaan waktu dari angkatan kerja anggota rumah tangga, merupakan fungsi

---

<sup>1</sup>Farid Alghofari, Jurnal ekonomi, Pengangguran di Indonesia 2007.

*opportunity costs* dari kegiatan ekonomi dan non- ekonomi, dan permintaan akan pendapatan (Standing,1978:55-56)

Dari struktur umur, Beberapa ahli menggunakan batas maksimum usia 24 tahun sebagai penduduk muda. Lluch dan Madzumar (1983) menggunakan batas 10-24 tahun sebagai kategori tenaga kerja muda, dan menyebutnya sebagai kelompok umur kritis. Bairoch(1988) menyatakan bahwa pada kebanyakan kasus dari penelitiannya kelompok tersebut terutama 15-24 tahun, memperlihatkan tingkat pengangguran yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keseluruhan kelompok umur, sebab pada umur tersebut merupakan waktu peralihan dari lepas sekolah dan memasuki angkatan kerja.<sup>2</sup>

Masalah selanjutnya adalah mengenai persebaran penduduk dalam hal ini adalah urbanisasi. Berdasarkan data, meningkatnya angka urbanisasi di Indonesia mencapai 75 persen.<sup>3</sup>

“Situasi ini menjadi sebuah persolan tersendiri sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran bertambah, sebab tidak semua kaum urban membekali dirinya dengan keahlian maupun pendidikan ,” meningkatnya angka urbanisasi secara langsung ikut mempengaruhi permasalahan sosial terutama pengangguran dan kemiskinan.

Masalah ketenagakerjaan yang tetap menonjol yang selanjutnya adalah pendapatan/pengupahan, Perhatian pemerintah terhadap nasib pekerjanya sebenarnya bukan cerita baru, banyak kebijaksanaan pemerintah yang ditujukan

---

<sup>2</sup> Ibid.,p1

<sup>3</sup> Robby Alexander Sirait, Urbanisasi dan Perkembangan Perkotaan di Indonesia,2007 <http://robbyalexandersirait.wordpress.com/2007/10/05/urbanisasi-mobilitas-dan-perkembangan-perkotaan-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 27 maret 2011)

untuk perbaikan nasib para pekerja, antara lain K3, Jamsostek, dan upah minimum. Namun pada kenyataannya pelaksanaan peraturan-peraturan ini banyak mengalami hambatan, baik karena ketidakmampuan maupun kurangpedulian pengusaha, tercermin dari banyaknya kasus pemogokan buruh yang menuntut haknya.

Nampaknya sampai saat ini pemerintah Indonesia masih meyakini bahwa upah minimum merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki nasib pekerja yang berpenghasilan rendah dan meningkatkan produktivitas kerjanya. Hal ini diyakini oleh international labour organization (ILO) yang mengemukakan bahwa *“minimum wages have an important role to play in protecting low income groups.”*(ILO 1991,h5).

Permasalahan baru yang dihadapi Kemenakertrans, tenaga kerja di Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang 50 persen lebih hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Selain itu jenis kelulusan calon tenaga kerja tidak sesuai dengan peluang yang tersedia. LIPI mencatat, tingkat warga yang termasuk dalam kategori setengah pengangguran terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dari 29,64 juta orang pada 2005 menjadi 32,8 juta pada 2010. Diperkirakan pada 2011, jumlah warga dengan kategori setengah pengangguran diproyeksikan meningkat menjadi 34,32 juta orang.”<sup>4</sup>

Pengangguran tidak saja dialami oleh kelompok tenaga kerja tidak terdidik tetapi juga oleh tenaga kerja terdidik lulusan SMA dan Sarjana. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh harian kompas, tanggal 6 februari 2008, tercatat per

---

<sup>4</sup> Bogor Smart Entrepreneur.2007.<http://www.komunitasBSE.com> (diakses pada tanggal 1 Januari 2011)

februari 2007 terdapat 740,206 penganggur lulusan perguruan tinggi, dan kondisi ini akan terus meningkat sebanyak 20% pertahun. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan proporsi antara tingkat lulusan yang terjadi tiap tahun dan lapangan pekerjaan yang tersedia.<sup>5</sup>

Melihat masalah lainnya diatas peneliti tertarik untuk meneliti Pengaruh antara Tingkat Upah Minimum dan Tingkat pendidikan terhadap Pengangguran di Indonesia.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

1. Apakah jumlah dan pertumbuhan penduduk di suatu Negara dapat mempengaruhi perkembangan jumlah pengangguran?
2. Apakah persebaran penduduk/urbanisasi dapat mempengaruhi jumlah pengangguran?
3. Apakah pertumbuhan pendapatan atau tingkat upah dapat mempengaruhi jumlah pengangguran?
4. Apakah tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pengangguran?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, peneliti membatasi penelitian mengenai Pengaruh antara Tingkat Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pendidikan Tinggi Terhadap Pengangguran di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Maisaroh. Analisis “*Faktor-faktor penentu kesuksesan pendidikan Entrepreneurship*”. Kompilasi Jurnal ekonomi.2006.p.35

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat Pengaruh antara Tingkat Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Tingkat Pendidikan Tinggi terhadap Pengangguran?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti:

a. Kegunaan Teoretis

Terkait dengan pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang mendalam baik bagi peneliti pribadi maupun bagi pembaca sekalian terutama mengenai pengaruh antara tingkat upah dan tingkat pendidikan terhadap pengangguran di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengaruh. tingkat upah dan tingkat pendidikan terhadap pengangguran di Indonesia.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI TEORETIS, KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS**

#### **A. Deskripsi Teoretis**

##### **1. Hakikat Pengangguran**

Masalah pengangguran dengan segala dampaknya di Indonesia sudah memprihatinkan. Jumlah pengangguran merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu Negara dalam melakukan pembangunan, baik dalam peningkatan di bidang pembangunan ekonominya maupun di bidang kesejahteraan sosial penduduknya.

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.<sup>6</sup>

Biro pusat statistik (BPS) membedakan angkatan kerja menjadi penduduk yang bekerja dan penduduk yang mencari pekerjaan atau dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

Menurut Iwan Prasodjo dalam jurnalnya mengatakan bahwa Yang dimaksud dengan menganggur adalah :

“Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dalam kurun waktu seminggu sebelum pencacahan dan sedang berusaha mencari pekerjaan dan ini mencakup mereka yang sedang menunggu panggilan lamaran bekerja

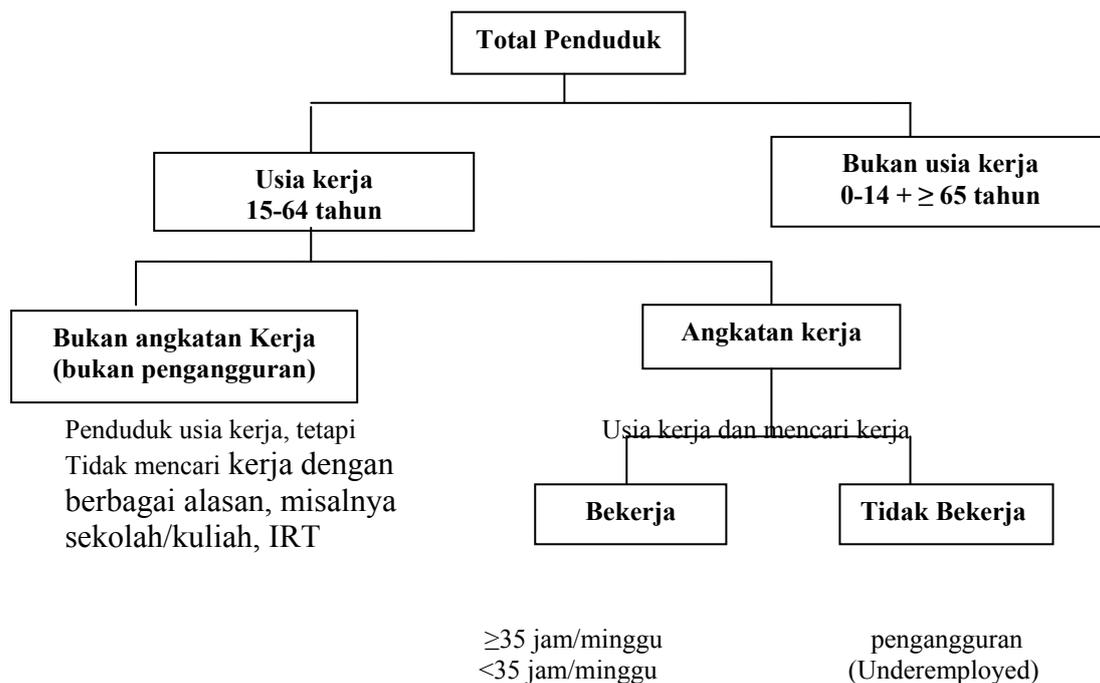
---

<sup>6</sup> Mochammad Luthfi Nugroho, Perekonomian Indonesia sesi 2 pengangguran terbuka pada tingkat pendidikan universitas. 2011 [http:// www.wikipedia.com/pengangguran.htm](http://www.wikipedia.com/pengangguran.htm) (diakses pada 8 januari 2011)

yang diajukan atau sedang tidak mencari pekerjaan karena beranggapan tidak ada kesempatan kerja yang tersedia baginya walaupun ia sanggup dan mau bekerja.”<sup>7</sup>

Sedangkan Dalam ilmu kependudukan (demografi) yang dimaksud dengan pengangguran adalah:

“Orang yang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Berdasarkan kategori usia, usia angkatan kerja adalah 15-64 tahun. Tetapi tidak semua orang yang berusia 15-64 tahun dihitung sebagai angkatan kerja. Yang dihitung sebagai angkatan kerja adalah penduduk berusia 15-64 tahun dan sedang mencari kerja, sedangkan yang tidak mencari kerja, entah karena harus mengurus keluarga atau sekolah, tidak masuk angkatan kerja. Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak/belum mendapatkan pekerjaan.”<sup>8</sup>



Gambar II.1 Diagram penduduk berdasarkan usia<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Iwan Prasodjo, “Pengangguran dan setengah pengangguran di perkotaan,” jurnal SDM h.57

<sup>8</sup> Prathama rahardja, Mandala manurung, Teori ekonomi makro (Jakarta: universitas Indonesia 2005), h.193

<sup>9</sup> Ibid, h193

Pada diagram diatas terlihat bahwa jumlah penduduk suatu Negara dapat dibedakan menjadi penduduk usia kerja (15-64 tahun) dan bukan usia kerja. Yang masuk kelompok bukan usia kerja (usia non produktif) adalah anak-anak (0-14 tahun) dan manusia lanjut usia (manula) yang berusia > 65 tahun. Dari jumlah penduduk usia kerja, yang masuk angkatan kerja adalah mereka yang mencari kerja atau bekerja. Sebagian yang tidak bekerja (dengan berbagai alasan) tidak masuk angkatan kerja (bukan angkatan kerja). Lebih lanjut lagi terlihat, ternyata tidak semua angkatan kerja memperoleh angkatan kerja. Mereka inilah yang disebut penganggur.

Indonesia sampai saat ini masih dibebani oleh masalah tingginya angka pengangguran, hal tersebut diakibatkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan kesempatan kerja yang memicu timbulnya permasalahan sentral dalam ketenagakerjaan, Angkatan kerja pada tahun 2006 yang sebesar 17,34 juta meningkat dibandingkan tahun 2005 yang sebesar 17,04 juta orang, sedangkan yang mencari pekerjaan terjadi penurunan dari 2,03 juta pada tahun 2005 menjadi 1,89 juta pada tahun 2006 dan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 11,91% pada tahun 2005 menjadi 10,95% pada tahun 2006. hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang begitu besar belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor formal sebagai akibat lapangan pekerjaan yang kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang rendah.

Berikut merupakan tabel jumlah pengangguran terbuka di 24 provinsi di Indonesia tahun 2007-2009:

**Tabel II.1 Jumlah pengangguran terbuka di 21 provinsi di Indonesia tahun  
2007-2009**

Provinsi	Pengangguran Terbuka		
	2007	2008	2009
N.A.D	183822	163868	173624
SUMBAR	220377	206740	172253
RIAU	196308	208931	206471
JAMBI	84744	74222	69857
BENGKULU	44467	33285	46054
LAMPUNG	285929	230388	230942
YOGYAKARTA	118877	119785	122972
BALI	98305	95512	60405
NTB	159713	107795	12494
NTT	83568	81766	6516
KALBAR	154883	140561	127186
KALSEL	117226	118374	118406
KALTENG	55244	5162	49008
KALTIM	161925	142506	165087
MALUKU	76443	61231	61194
MALUT	33768	29338	29117
GORONTALO	29457	29809	23429
SULUT	141646	129302	114528
SULTRA	68689	58253	53067
SULTENG	77823	8843	63154
PAPUA	55121	51129	45023
<b>Total</b>	<b>2,561,449</b>	<b>2,208,344</b>	<b>2,182,447</b>

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah pengangguran setiap tahunnya di 21 provinsi mulai tahun 2007-2009 tersebut mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) pada tahun-tahun tersebut yakni sebesar 6,6; 11,1; dan 6,0(%)<sup>10</sup>. Maka untuk memenuhi permintaan tersebut

<sup>10</sup>BI.[http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/7AB8DDF7-2E3D-4E62-B8D086E14C63325E/15749/APBNPenyesuaian\\_20091.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/7AB8DDF7-2E3D-4E62-B8D086E14C63325E/15749/APBNPenyesuaian_20091.pdf) (Diakses pada tanggal 16 januari 2012)

produsen akan meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) maka, pengangguran berkurang.

Menurut Manning (1984: 1-28), kadar pengangguran yang rendah disebabkan karena:

- (a) besarnya kemampuan sektor informal menyerap, bahkan menarik sejumlah besar penganggur
- (b) tingkat investasi pemerintah yang tinggi dalam proyek pembangunan dan prasarana sosial (sekolah, klinik kesehatan dan lain-lain), dan
- (c) pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan adanya peluang pekerjaan baru di luar bidang usaha tani di pedesaan.<sup>11</sup>

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Jurnal inflasi dan pengangguran di Indonesia oleh Prof.Dr.H. Amri Amir, SE., MS Guru Besar Fak.Ekonomi Uni. Jambi

<sup>12</sup> Ibid.,h.29

Sedangkan Jenis-jenis pengangguran adalah:

1. Pengangguran Friksional / *Frictional Unemployment*, Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan, penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
2. Pengangguran Musiman / *Seasonal Unemployment*, Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukang jualan duren yang menanti musim durian.
3. Pengangguran Siklikal, Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.”<sup>13</sup>

Menurut Mandala manurung Ada dua dasar utama klasifikasi pengangguran, yaitu pendekatan angkatan kerja (*labour force approach*) dan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*labour utilization approach*).<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Mandala manurung, *Teori Makro Ekonomi*, jenis-jenis pengangguran h.196

<sup>14</sup> Prathama rahardja, Mandala manurung, loc, cit

## 1. Pendekatan angkatan kerja

Pendekatan ini mendefinisikan penganggur sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja.

## 2. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja

Dalam pendekatan ini, angkatan kerja dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni:

- a.) Menganggur (*Unemployed*), yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini sering disebut juga pengangguran terbuka (*open unemployment*). Berdasarkan definisi ini tingkat pengangguran di Indonesia umumnya relatif tinggi, yaitu angkanya berkisar 35% pertahun
- b.) Setengah menganggur , yaitu mereka yang bekerja, tetapi belum dimanfaatkan secara penuh. Artinya jam kerja mereka dalam seminggu kurang dari 35 jam. Berdasarkan definisi ini tingkat pengangguran di Indonesia relatif rendah karena Bekerja penuh (*Employed*), angkanya mencapai 3%-5% pertahun

Sebagian besar (54 persen) pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran dengan tingkat pendidikan rendah yang tidak memiliki keahlian (*unskill*). Sedangkan pengangguran dengan tingkat pendidikan universitas hanya 6

persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa, secara umum pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran yang mempunyai kualitas rendah.<sup>15</sup>

Namun Dewasa ini banyak lontaran kritik terhadap sistem pendidikan yang pada dasarnya mengatakan bahwa perluasan kesempatan belajar cenderung telah menyebabkan bertambahnya pengangguran tenaga terdidik dari pada bertambahnya tenaga produktif yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Kritik ini tentu saja beralasan karena data sensus penduduk memperhatikan kecenderungan yang menarik bahwa proporsi jumlah tenaga penganggur lulusan pendidikan yang lebih tinggi ternyata lebih besar dibandingkan dengan proporsi penganggur dari lulusan yang lebih rendah (Ace Suryadi, 1993: 134).<sup>16</sup>

Dengan kata lain persentase jumlah penganggur tenaga sarjana lebih besar dibandingkan dengan persentase jumlah penganggur lulusan SMA atau jenjang pendidikan yang lebih rendah.

Menurut hasil survey *Institute Development of economics and finance* jumlah pengangguran terdidik (SMA-Universitas) rata-rata meningkat 25,75% pertahun dalam kurun waktu 2007-2010 hal tersebut terjadi karena:

1. tidak seimbangny struktur atas dan struktur bawah
2. kualitas tenaga kerja
3. ketidaksesuaian sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja
4. regulator power dan lemahnya koordinasi antara departemen.<sup>17</sup>

Lulusan perguruan tinggi semakin membengkak yang diimplikasikan terjadinya pengangguran intelektual yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya mekanisme keseimbangan penawaran

---

<sup>15</sup> jurnal ekonomi oleh Iwan Prasodjo “pengangguran dan setengah pengangguran di perkotaan”h63

<sup>16</sup> Suryadi, Ace dan H.A.R. Tilaar. 1993. Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar Bandung: Rosdakarya

<sup>17</sup> Hedi Kuswanto. *Relevansi dunia pendidikan dalam mengantisipasi pengangguran intelektual*. Jurnal ekonomi h 41-44 tahun 2003

dengan permintaan pasar tenaga kerja dan permasalahan lain yang sangat kompleks. Padahal Pendidikan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Wahyu Winarsih mengatakan bahwa:

Disamping rata-rata lama sekolah, indikator pendidikan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga dapat digunakan sebagai ukuran melihat sejauh mana kualitas sumber daya yang dimiliki. Keberhasilan pembangunan pendidikan antara lain tercermin dari makin membaiknya struktur angkatan kerja yang ditandai dengan makin tingginya presentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan tinggi.<sup>18</sup>

Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Suprobo, T.B (2002) yang menyatakan bahwa:

“Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah kecenderungan Proporsi *underemployment* pekerja usia muda”<sup>19</sup>

Hal tersebut berarti, pendidikan diharapkan akan mampu menanggulangi masalah-masalah dalam pembangunan dan ketenagakerjaan, dan pengangguranlah salah satunya. Karena seseorang menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan yang tinggi agar dapat meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas kerjanya. Jika produktivitas kerjanya bagus menandakan pertumbuhan ekonomi yang baik yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran. Sedangkan besarnya angka pengangguran terdidik dapat disebabkan karena:

1. sekitar 40% sarjana yang baru lulus ingin segera bekerja dengan gaji yang besar
5. para sarjana cenderung mau bekerja pada sektor padat modal
6. ingin mencari pekerjaan yang lebih baik sementara kapasitas lapangan yang tersedia terbatas.<sup>20</sup>

Teori pendekatan *human capital* dari Sjaastad yang kemudian dikembangkan oleh Todaro (1980) salah satunya mengangkat dari penyebab

<sup>18</sup> Wahyu Winarsih. *Analisis Biaya dan Manfaat Investasi Pendidikan di Indonesia*. (Jakarta: BPS. 2005), h.32

<sup>19</sup> Laila Nagib “Pengembangan sumber daya manusia: di antara peluang dan tantangan”

<sup>20</sup> *ibid.*,

pengangguran adalah “ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan kebutuhan (surplus tenaga kerja) dan ketidaksesuaian pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dengan dengan lapangan kerja tersedia serta rendahnya upah pekerja.”<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Simanjuntak (1990) menyebutkan penyebab pengangguran dalam repelita ini masih tetap mengenai “keterbatasan lapangan pekerjaan,rendahnya mutu tenaga kerja serta rendahnya produktivitas tenaga kerja”<sup>22</sup>

*International Labour Organisasi* (dalam manning dan effendi1985) menyatakan bahwa : pengangguran sebagai akibat pemanfaatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan : (a) jam kerja (*by hour of work*), (b) tingkat penghasilan(*by income level*), (c) jenjang pendidikan dan jabatan (*by mismatch of occupation and education*)<sup>23</sup>

Bellante (1990:25) <sup>24</sup>mengatakan bahwa: “Proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penawaran dan permintaan tenaga kerja dinamakan pasar kerja. seseorang dalam pasar kerja berarti dia menawarkan jasanya untuk produksi, apabila dia sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Besarnya penempatan jumlah orang yang bekerja atau employment dipengaruhi oleh faktor kekuatan penawaran dan permintaan tersebut,selanjutnya besarnya penawaran dan permintaan kerja dipengaruhi oleh tingkat upah”<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> “ perkembangan tingkat upah di Indonesia”, Jurnal Ilmiah ekonomika 2009,p 28

<sup>22</sup> Sumarlin;iskandar syarif, “*Analisis hubungan tingkat upah tinggi terhadap pengangguran di Indonesia*”, Mepa Ekonomi: Jurnal Magister Ilmu Ekonomi.2007, p58-78

<sup>23</sup> Triyana Iskandarsyah, “pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Indonesia”.

<sup>24</sup> Bellante, Don and Jackson, Mare. (1990). *Ekonomi Ketenagakerjaan*, LPFE UI, Jakarta.

<sup>25</sup> Makmuri sukarno. “*Latar belakang sosial budaya dan pencapaian pekerjaan-pendapatan*”. Jurnal kependudukan Indonesia. Hal 29-46 tahun 2006

Selain daripada itu kita perlu memperhatikan beberapa faktor yang menyebabkan perlunya pengembangan tingkat pendidikan di dalam usaha membangun suatu perekonomian.<sup>26</sup> *Pertama*, pendidikan lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas *Kedua*, pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari pengetahuan-pengetahuan teknik yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan modern *Ketiga*, pengetahuan yang lebih baik diperoleh dan pendidikan dapat menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan- pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya. Dengan demikian, tingkat pendidikan yang tinggi akan menjamin perbaikan yang terus berlangsung dalam tingkat teknologi yang digunakan masyarakat.

Sedangkan penyebab orang menganggur adalah:

Dalam hal ini penyebab pengangguran bisa disebabkan oleh kemalasan, cacat/udzur dan rendahnya pendidikan dan ketrampilan.<sup>27</sup>

Pertama: Faktor Pribadi

a. Faktor kemalasan

Pengangguran yang berasal dari kemalasan individu sebenarnya sedikit.

Namun, dalam sistem materialis dan politik sekularis, banyak yang mendorong masyarakat menjadi malas, seperti sistem penggajian yang tidak layak atau

---

<sup>26</sup> Togar Saragih, op.cit., h.62

<sup>27</sup> M. Sholahuddin, apa penyebabnya pengangguran dan sulitnya lapangan kerja [http:// www.jurnal-ekonomi.org/Apa penyebab pengangguran dan sulitnya lapangan kerja dalam perekonomian kapitalis](http://www.jurnal-ekonomi.org/Apa%20penyebab%20pengangguran%20dan%20sulitnya%20lapangan%20kerja%20dalam%20perekonomian%20kapitalis). (Diakses pada tanggal 7 januari 2011)

maraknya perjudian. Banyak orang yang miskin menjadi malas bekerja karena berharap kaya mendadak dengan jalan menang judi atau undian.

b. Faktor cacat /uzur

Dalam sistem kapitalis hukum yang diterapkan adalah 'hukum rimba'. Karena itu, tidak ada tempat bagi mereka yang cacat/uzur untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

c. Faktor rendahnya pendidikan dan keterampilan

Saat ini sekitar 74% tenaga kerja Indonesia adalah mereka yang berpendidikan rendah, yaitu SD dan SMP. Dampak dari rendahnya pendidikan ini adalah rendahnya keterampilan yang mereka miliki. Belum lagi sistem pendidikan Indonesia yang tidak fokus pada persoalan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan dan dunia kerja. Pada akhirnya mereka menjadi pengangguran intelek.

*Kedua:* faktor sistem sosial dan ekonomi

Faktor ini merupakan penyebab utama meningkatnya pengangguran di Indonesia, di antaranya:

a. Ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan

b. Tahun depan diperkirakan akan muncul pencari tenaga kerja baru sekitar 1,8 juta orang, sedangkan yang bisa ditampung saat ini dalam sektor formal hanya 29%. Sisanya di sektor informal atau menjadi pengangguran.

Namun, Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

## 2. Tingkat Upah Minimum

Disadari atau tidak tingkat kepuasan (atau tingkat ketidakpuasan) masing-masing pekerja atas suatu pekerjaan tidaklah sama, maka bisa difahami terjadinya kemungkinan perbedaan tingkat upah yang mencerminkan adanya perbedaan selera atau preferensi terhadap setiap jenis pekerjaan. Kemungkinan perbedaan tingkat upah yang mencerminkan adanya perbedaan selera atau preferensi terhadap setiap jenis pekerjaan inilah yang sering disebut sebagai teori penyamaan tingkat upah (*theory of equalizing wage difference*). Terkadang seseorang mau mengorbankan rasa tidak sukanya terhadap suatu pekerjaan demi memperoleh imbalan tinggi; atau sebaliknya ada orang yang mau menerima pekerjaan yang memberi upah rendah, padahal dia bisa memperoleh pekerjaan yang memberi upah lebih tinggi, semata-mata karena ia menyukai pekerjaan tersebut. Setiap pekerjaan memiliki penawaran dan permintaan tersendiri yang menentukan tingkat upah serta jumlah pekerja yang bisa di serap.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Maimun Sholeh, permintaan dan penawaran tenaga kerja serta upah: Teori serta beberapa potret nya di Indonesia. Universitas negeri yogyakarta

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, oleh karenanya upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Sebagai imbalan terhadap tenaga dan pikiran yang diberikan pekerja kepada pengusaha, maka pengusaha akan memberikan kepada pekerja dalam bentuk upah. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Jadi upah berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut kepada pengusaha. Upah dibayar oleh pengusaha sesuai atau sama dengan usaha kerja (produktivitas) yang diberikan kepada pengusaha.

Upah merupakan salah satu unsur untuk menentukan harga pokok dalam perusahaan, karena ketidaktepatan dalam menentukan besarnya upah akan sangat merugikan perusahaan. Oleh karenanya ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah yaitu sebagai berikut :

1. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja

Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi dan jumlah tenaga kerjanya langka, maka upah cenderung tinggi, sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah, upahnya cenderung turun.

2. Organisasi Buruh

Ada tidaknya organisasi buruh serta kuat lemahnya organisasi buruh akan mempengaruhi tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat akan meningkatkan tingkat upah demikian pula sebaliknya.

3. Kemampuan untuk Membayar

Pemberian upah tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, tingginya upah akan mengakibatkan tingginya biaya produksi, yang pada akhirnya akan mengurangi keuntungan.

#### 4. Produktivitas Kerja

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi kerja karyawan. Semakin tinggi prestasi kerja karyawan, maka semakin besar upah yang mereka terima. Prestasi kerja ini dinyatakan sebagai produktivitas kerja.

#### 5. Biaya Hidup

Dikota besar dimana biaya hidup tinggi, upah kerja cenderung tinggi. Biaya hidup juga merupakan batas penerimaan upah dari karyawan.

#### 6. Pemerintah

Pemerintah dengan peraturan-peraturannya mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan tentang upah umumnya merupakan batas bawah dari tingkat upah yang harus dibayarkan.<sup>29</sup>

Berdasarkan peraturan pemerintah no 8/1981 tentang perlindungan upah, yang dimaksud dengan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.

Upah dapat dilihat dari sudut pandang pengusaha maupun pekerja. Pengusaha melihat upah sebagai biaya yang harus dibayarkan kepada pekerja dan diperhitungkan dalam penentuan biaya total; sedangkan pekerja melihat upah sebagai imbalan terhadap usaha kerjanya.

Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya. Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan (Mankiw, 2006). Menurut Kaufman (2000), tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan,

---

<sup>29</sup> Triyana Iskandarsyah, "pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Indonesia".p1-88

efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin.

Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

Menurut Hasanuddin Rachman (2005)<sup>30</sup>, Tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan secara mikro dan makro. Secara mikro tujuan penetapan upah minimum yaitu

- (a) sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot,
- (b) mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan, dan
- (c) meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah.

Sedangkan secara makro, penetapan upah minimum bertujuan untuk:

- (a) pemerataan pendapatan,
- (b) peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja,
- (c) perubahan struktur biaya industri sektoral,

---

<sup>30</sup> Ibid., p23

- (d) peningkatan produktivitas kerja nasional,
- (e) peningkatan etos dan disiplin kerja, dan
- (f) memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha dalam rangka hubungan bipartite.

Pada awalnya upah minimum ditentukan secara terpusat oleh Departemen Tenaga Kerja untuk region atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan otonomi daerah, kemudian mulai tahun 2001 upah minimum ditetapkan oleh masing-masing provinsi. Upah Minimum ini dapat dibedakan menjadi upah minimum regional dan upah minimum sektoral.

#### 1. Upah Minimum Regional

Upah Minimum Regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum regional (UMR) dibedakan menjadi dua, yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II). Namun sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka istilah Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional Tingkat I I (UMR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten /Kota (UM kab/kota).

#### 2. Upah Minimum Sektoral

Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku dalam suatu provinsi berdasarkan kemampuan sektor. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja :

Per-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum sektoral dibedakan menjadi Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I I (UMSR Tk. II). Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka terjadi perubahan istilah Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) menjadi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMS kab/kota).

Variabel-variabel yang mempengaruhi upah minimum regional (UMR) Tingkat I dan II sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, adalah sebagai berikut : kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, tingkat upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak serta sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 (4) tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa besaran upah minimum antara lain didasarkan pada tahap pencapaian KHL, pertumbuhan PDRB, produktivitas, dan mempertimbangkan keberadaan sektor marjinal (usaha yang paling tidak mampu). Pada

pelaksanaannya, pertimbangan pada usaha tidak mampu ternyata belum dapat dioperasionalkan.

Sedangkan berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja nomor: PER 05/MEN/1989 tentang Upah minimum, upah minimum merupakan upah pokok belum termasuk tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada pekerjanya.

Upah minimum ditetapkan dengan keputusan menteri tenaga kerja dan terutama didasarkan atas pertimbangan:

- a. Kebutuhan fisik minimum
- b. Indeks harga konsumen
- c. Perluasan kesempatan kerja
- d. Upah pada umumnya yang berlaku secara regional
- e. Kelangsungan dan perkembangan perusahaan
- f. Tingkat perkembangan perekonomian regional dan atau nasional

Secara empiris terdapat tiga komponen yang memengaruhi besarnya upah minimum, yaitu: kebutuhan fisik minimum (KFM), indeks Harga konsumen (IHK) dan pertumbuhan ekonomi daerah, sebenarnya ada satu variabel lagi yang cukup berpengaruh dalam besar kecilnya upah minimum, yaitu kemampuan perusahaan.

Kebutuhan hidup minimum atau KFM adalah kebutuhan pokok seseorang yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang minimum baik ditinjau dari segi jumlah maupun ditinjau dari segi mutu barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari atau dikurangi lagi.

Nilai KFM mencerminkan nilai ekonomi dari barang dan jasa yang diperlukan oleh pekerja dan keluarganya dalam jangka waktu satu bulan. Barang jasa ini dibagi dalam lima kelompok barang, yaitu:<sup>31</sup>

1. Makanan dan minuman
2. Bahan bakar, alat penerangan, dan peneduh
3. Perumahan dan peralatan dapur
4. Sandang atau pakaian
5. Lain-lain

Pada tahun 1989, peraturan menaker nomor: PER-05/MEN/1989 dikeluarkan untuk mengatur system upah minimum , yang sebenarnya sudah diterapkan hampir pada seluruh propinsi di Indonesia sejak tahun 1970 an. System baru ini ditujukan untuk mencapai sasaran pemerintah untuk meningkatkan persentase upah minimum terhadap KFM bahkan sampai sama dengan KFM, karena pada kenyataannya tingkat upah minimum masih berada di bawah kebutuhan fisik minimum.

Upah minimum tidak lagi ditetapkan berdasarkan KFM, tetapi berdasarkan kebutuhan hidup minimum (KHM), yang sekitar 15-20% lebih tinggi dari dari KFM dan dihitung untuk memenuhi kebutuhan 3000 kalori per hari.

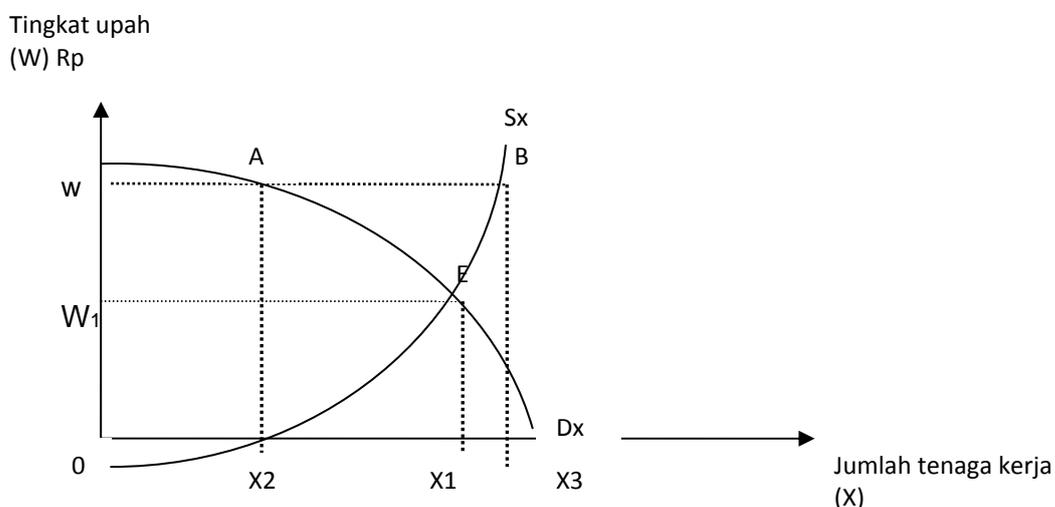
Apapun alasan sebenarnya yang mendasari kebijakan pasar kerja ini, upah minimum telah meningkat begitu dramatis sehingga banyak yang meragukan manfaatnya. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa peningkatan biaya tenaga kerja yang dramatis ini akan membawa dampak berkurangnya minat investor menanamkan uangnya di Indonesia. Investasi asing yang sudah ada bisa saja di relokasi, sedangkan investor baru akan mencari Negara-negara yang menawarkan

---

<sup>31</sup> (Biro pusat Statistik 1986)

tenaga kerja dengan biaya yang jauh lebih murah, seperti Bangladesh atau Vietnam. Lebih lanjut, peningkatan biaya tenaga kerja akan mendorong penggunaan teknologi padat modal dan menghindari teknologi padat karya, yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah pengangguran.

Jika dilihat dari sisi penawaran tenaga kerja, Gambar II.2 menjelaskan peraturan upah minimum yang dikenakan pada pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Tingkat upah minimum yang berlaku sebelum ada peraturan upah minimum adalah  $W_1$  dan jumlah orang yang dipekerjakan adalah  $OX_1$  (yaitu, keseimbangan terjadi pada E). Dengan dikenakannya peraturan upah minimum  $w$  maka tingkat upah tidak bisa turun dibawah dan ini mengakibatkan permintaan akan tenaga kerja turun menjadi  $OX_2$  sedang jumlah tenaga kerja yang menawarkan diri adalah  $OX_3$ . Ini berarti bahwa tingkat upah yang lebih tinggi tersebut harus dibayar dengan ongkos sosial berupa  $X_2X_1$  orang yang semula bekerja sekarang kehilangan pekerjaan dan  $X_1X_3$  orang baru yang mencari pekerjaan. Jadi jumlah pengangguran total adalah  $X_2X_3$  orang =  $(X_2X_1 + X_1X_3)$  orang (Boediono, 2002).



Gambar II.2  
 Penetapan Upah Minimum di Pasar Tenaga Kerja  
 Sumber: Boediono 2002<sup>32</sup>

Kurva penawaran yang mengarah ke atas, itu berarti semakin banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja, akan semakin besar tingkat upah yang harus dibayarkan.

Menurut teori klasik dalam pendapat Misesian bahwa:

“Di pasar bebas, pengangguran yang terjadi adalah pengangguran sukarela”. Manusia bekerja karena memilih untuk mengantisipasi atas hasil pekerjaannya ketimbang menyalakan tenaganya atau penghasilan/manfaat fisik yang diperoleh seandainya ia memutuskan tidak bekerja. Ia akan ”berhenti bekerja pada suatu titik, saat ia merasa bahwa menikmati waktu senggangnya tidak lagi berarti penyalakan kesempatan kerja; atau saat manfaat waktu senggangnya dianggap lebih berharga daripada penambahan kepuasan yang mungkin didapat seandainya ia bekerja terus” dan dalam kata lain adalah pengangguran sukarela.

Kemudian menurut Teori Keynes memulai dengan menyatakan secara keliru teori klasik tersebut yang mengasumsikan bahwa:

"Dalam pengertian yang ketat, pengangguran nonsukarela tidaklah ada" (Keynes 1936: 21, 6,15) Teori klasik tidak berasumsi demikian. Teori klasik mengasumsikan bahwa secara logis/praksiologis, pengangguran nonsukarela tidak mungkin terjadi selama pasar beroperasi secara bebas. Bahwa pengangguran nonsukarela, dalam segala tingkatannya, dapat terjadi jika terdapat institusi-institusi ekstra-pasar, seperti misalnya peraturan tentang upah minimum, tidaklah pernah diragukan secara serius.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Adit agus prastyo. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. 2010 . [http://eprints.undip.ac.id/23026/1/skripsi\\_full\\_teks.pdf](http://eprints.undip.ac.id/23026/1/skripsi_full_teks.pdf) (diakses pada tanggal 16 januari 2012)

<sup>33</sup> Hans-Hermann Hoppe “Teori Umum Keynes Dalam Pandangan Misesian” “The Misesian Case Against Keynes”, oleh Hans- Hermann Hoppe, Universitas Nevada, Las Vegas dan Institut Ludwig von Mises, terbit perdana dalam Dissent on Keynes: A Critical Appraisal of Keynesian Economics, disunting oleh Mark Skousen. New York: Praeger (1992). Hal. 171–198.

Menurutnya, dengan penerapan kebijakan upah minimum dalam keadaan pasar bebas, maka meningkatnya upah minimum di atas tingkat upah pasar, akan menimbulkan banyak dampak antara lain akan membuat para pekerja dirumahkan dan menjadi pengangguran “nonsukarela” seperti yang di bahas oleh teori Misesian di atas hal ini terjadi karena perusahaan akan beralih pada sektor padat modal dengan mempertahankan pekerja yang sedikit dengan produktivitas tinggi dengan teknologi tinggi.

Hal ini sejalan dengan teori produksi dimana berdasarkan faktor produksi yaitu  $Q = f(K, L, R, T)$ . Dimana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja dan ini meliputi berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian kewirausahaan, R adalah kekayaan alam, dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis factor-faktor produksi tersebut. Kegiatan memproduksi dalam jangka pendek dipengaruhi oleh hukum produksi marjinal yang semakin menurun/berkurang. Hukum ini menyatakan, pada permulanya, pada tahap awal dari proses produksi, penambahan seunit (seorang) tenaga kerja akan meningkatkan produksi marjinal. Akan tetapi pada tahap berikutnya, penambahan seunit (seorang) tenaga kerja akan menambah produksi marjinal pada kuantitas yang semakin berkurang sehingga pada akhirnya produksi marjinal adalah nol. Pada tahap berikutnya, produksi total akan merosot dan produksi marjinal adalah negatif. Dengan kata lain dengan penambahan atau pengurangan tenaga kerja akan mempengaruhi jumlah output. oleh karena itu dalam fungsi produksi semua faktor saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan.

Hal yang paling ditakutkan oleh para perusahaan adalah ketika Penerapan kebijakan upah minimum dinaikkan maka akan membuat investor asing yang menerapkan prinsip ekonomi liberal, beralih mencari perusahaan yang tidak menerapkan kebijakan tersebut, karena pada hakekatnya seorang pemodal akan meminimalisir biaya produksi termasuk didalamnya adalah *human capital* agar diperoleh hasil profit tinggi, alhasil akan banyak pekerja yang semula bekerja akan dirumahkan karena perusahaan tidak mampu membayar banyak pekerja dengan gaji atau tingkat upah yang tinggi, jadi dapat disimpulkan bahwa teori Keynes mengatakan kebijakan upah minimum akan menambah pengangguran “nonsukarela”. Hal ini Sejalan dengan pemikiran Keynes, Menurut Misesian mengatakan bahwa:

“Sesungguhnya, institusi ekstra-pasar pada prinsipnya dapat menciptakan pengangguran nonsukarela sebesar apapun yang diinginkannya. Penetapan upah minim senilai, katakanlah, satu juta dolar per jam, jika dipaksakan, akan melucuti pekerjaan sebagian besar orang dan, sejalan dengan pemaksaan untuk berswasembada, akan menimbulkan kelaparan serta dapat berakibat kematian bagi sebagian besar populasi dunia. Dengan absennya institusi apapun itu yang luput dari aturan main pasar-bebas, maka pengangguran nonsukarela secara logis merupakan hal mustahil dan kemakmuran, bukan pemiskinan, akan tercipta.”<sup>34</sup>

Keynes kemudian mendefinisikan pengangguran nonsukarela sebagai berikut:

"Manusia disebut menganggur secara nonsukarela jika, ketika terjadi kenaikan kecil dalam harga barang-upah (yaitu, barang konsumsi) secara relatif terhadap upah-uang, baik suplai agregat dari pekerja yang bersedia bekerja dengan upah-uang yang berlaku dan permintaan agregat

---

<sup>34</sup> Hans-Hermann Hoppe “Teori Umum Keynes Dalam Pandangan Misesian” “The Misesian Case Against Keynes”, oleh Hans- Hermann Hoppe, Universitas Nevada, Las Vegas dan Institut Ludwig von Mises, terbit perdana dalam *Dissent on Keynes: A Critical Appraisal of Keynesian Economics*, disunting oleh Mark Skousen. New York: Praeger (1992). Hal. 171–198

terhadapnya pada tingkat upah tersebut akan lebih besar daripada volume kesempatan kerja yang tersedia " <sup>35</sup>

Dalam bahasa sederhana, Keynes mengatakan bahwa manusia disebut menganggur secara nonsukarela jika kenaikan harga-harga relatif terhadap tingkat upah mengarah pada kesempatan kerja yang lebih besar. Sebagaimana dikatakan Mises:

Pengangguran merupakan sebuah fenomena dalam perekonomian yang tengah berubah. Kenyataan bahwa pekerja yang dipecat atas pertimbangan adanya perubahan dalam pengaturan proses produksi tidak dapat secara seketika memanfaatkan setiap peluang guna memperoleh pekerjaan baru melainkan harus menunggu peluang lain yang lebih baik ... tidaklah merupakan reaksi otomatis terhadap perubahan-perubahan yang telah terjadi, terlepas dari kehendak dan pilihan pencari kerja yang bersangkutan, melainkan merupakan akibat dari tindakan-tindakan yang disengaja. Jadi sifatnya spekulatif, bukan frictional. (Mises [1949] 1966: 600) <sup>36</sup>

Upah minimum adalah sebuah kontrofersi , bagi yang mendukung kebijakan tersebut mengemukakan bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan "*living wage*", yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dalam pasar monopsoni dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang *low skilled*.

Pada dasarnya, upah mempunyai kedudukan yang sentral dan strategis baik bagi diri pekerja dan keluarganya, bagi perusahaan maupun dalam kaitannya dengan kepentingan nasional secara luas. Bagi pekerja upah merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga secara langsung. Bagi perusahaan upah mempengaruhi biaya produksi dan tingkat harga yang pada

---

<sup>35</sup> *ibid.*,p15

<sup>36</sup> *ibid.*,

gilirannya berakibat pada pertumbuhan produksi serta perluasan dan pemerataan kesempatan kerja. Bagi pemerintah, upah merupakan sarana pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu keseimbangan upah harus tetap diupayakan.

Prinsip upah minimum sektoral disamping bersifat diferensiasi, juga lebih mengandung *unsurrent sharing*. *Rent sharing* merupakan salah satu aspek dari teori upah efisiensi dimana diramalkan bahwa pengusaha yang memiliki keuntungan lebih tinggi akan memberikan upah yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas, atau mengurangi biaya kontrol, *shirking habit*. *Turn over* tinggi dan intrik yang berpotensi memberikan kerugian lebih besar. (Blancflower.et.al1996).<sup>37</sup>

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan upah minimum terakhir ini masih menghadapi pro kontra, terutama kenaikan upah minimum. Para pengusaha menganggap bahwa kenaikan 10 % dari UMR adalah berlebihan dan sangat memberatkan mereka, terlebih-lebih lagi bahwa pekerja harus dibayar sebagai pekerja 39 harian dan bukan harian. Sedangkan SPSI yang melihat dari sudut pandang lain mengatakan bahwa kenaikan UMR sebesar 20% pun sebenarnya masih belum memberikan penghasilan yang layak bagi pekerjanya.

Selain dari pengusaha, juga terdapat kritik yang berasal dari beberapa ahli ekonomi seperti Madzumar dan Squire. Mereka menyatakan bahwa upah minimum, terutama bagi Negara yang jumlah penduduknya besar seperti

---

<sup>37</sup> Bambang setiaji & sudarsono . *Pengaruh diferensiasi upah antar propinsi terhadap kesempatan kerja*. Jurnal ekonomi pembangunan.hal 118.desember 2004

Indonesia, akan mengakibatkan bertambahnya pengangguran. baik yang terbuka maupun yang terselubung.

Bagi yang tidak setuju dengan upah minimum mengemukakan alasan bahwa penetapan upah minimum mengakibatkan naiknya pengangguran dan juga memungkinkan kecurangan dalam pelaksanaan yang selanjutnya berpengaruh pada penurunan tingkat upah dalam suatu sektor yang tidak terjangkau kebijakan upah minimum. Disamping itu penetapan upah minimum tidak memiliki target: yang jelas dalam pengurangan kemiskinan. Dari perbedaan-perbedaan pandangan tersebut kita bisa melacak akibat-akibat dari penetapan upah minimum yang mungkin timbul dengan beberapa asumsi, pertama bahwa semua sektor dan semua tenaga kerja terjangkau kebijakan upah minimum, kedua konsekuensi potensial dari efek *shock* terhadap pekerja diterapkan.

Ditinjau dari ekonomi makro kebijaksanaan upah minimum digolongkan ke dalam kebijaksanaan pendapatan (*income policy*), yang umumnya bertujuan untuk melakukan pemerataan pendapatan. Penetapan upah minimum ini untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, dan pada dasarnya adalah intervensi terhadap pasar tenaga kerja melalui sisi permintaan.

Berdasarkan Teori permintaan dan penawaran tenaga kerja, penetapan upah minimum bergantung pada kemiringan/ kecondongan (*slope*) dari kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja. permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap

kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Miller & Meiners (1993), berpendapat bahwa permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh nilai marjinal produk (*Value of Marginal Product, VMP*). Nilai marjinal produk (VMP) merupakan perkalian antara Produk Fisik Marginal (*Marginal Physical Product*) dengan harga produk yang bersangkutan. Produk Fisik Marginal (*Marginal Physical Product, MPP*) adalah kenaikan total produk fisik yang bersumber dari penambahan satu unit input variabel (tenaga kerja).

Dalam perkembangannya terdapat berbagai teori untuk menentukan tingkat upah berlaku. Penganut klasik menyatakan bahwa “upah ditentukan oleh produktivitas marginal” tetapi Marshall dan juga Hicks menyatakan bahwa “produktivitas marjinal hanyalah menentukan permintaan terhadap buruh saja, jadi bukan terhadap penawaran tenaga kerja.”

Namun akhirnya permintaan dan penawaran tenaga kerja menentukan tingkat upah yang berlaku. Isu umum dalam pembahasan mengenai pasar kerja selalu diasumsikan terdapatnya keseimbangan antara penawaran dan permintaan pekerja pada tingkat tertentu dengan jumlah pekerja tertentu pula. Namun adakalanya keseimbangan ini tidak selamanya menunjukkan tingkat upah yang terjadi di pasar kerja karena dalam pelaksanaannya terdapat campur tangan pemerintah atau karena ada yang menentukan tingkat upah minimum. Dalam jangka panjang, sebagian pengurangan permintaan pekerja bersumber dari berkurangnya jumlah perusahaan, dan sebagian lagi bersumber dari perubahan jumlah pekerja yang diserap masing-masing perusahaan. Jumlah perusahaan bisa berkurang karena pemberlakuan tingkat upah minimum tidak bisa ditanggung

oleh semua perusahaan. Hanya perusahaan yang sanggup menanggung upah minimum atau yang berhasil menyasati peraturan itu yang akan bertahan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh, Bambang Setiaji dan Sudarsono dalam jurnalnya *pengaruh diferensiasi upah antar propinsi terhadap kesempatan kerja*<sup>38</sup> yang menyatakan bahwa ternyata propinsi-propinsi yang melakukan diferensiasi upah atau tingkat upah yang berbeda-beda yang dihitung berdasarkan kebutuhan fisik minimum yang juga berbeda di setiap daerah dengan tingkat signifikansi yang beragam berpengaruh terhadap pengangguran di Indonesia.

Upah minimum yang lebih tinggi menunjukkan penghasilan ekspektasi (*expected return*) pekerja semakin tinggi, sehingga mendorong pekerja untuk berpindah dari pasar kerja berpendidikan rendah ke pasar kerja berpendidikan tinggi. Di sisi permintaan, tingkat upah yang tinggi akan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja berpendidikan tinggi. Pada akhirnya dampak peningkatan upah minimum tersebut pada sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja akan mempengaruhi jumlah pengangguran.<sup>39</sup> Namun hal ini tidak berpengaruh signifikan, dikarenakan tidak semua perusahaan dalam suatu provinsi benar-benar menerapkan kebijakan upah minimum.

Isu umum dalam pembahasan mengenai pasar' kerja selalu diasumsikan terdapatnya keseimbangan antara penawaran dan permintaan pekerja pada tingkat tertentu dengan jumlah pekerja tertentu pula. Namun adakalanya keseimbangan

---

<sup>38</sup> Bambang setiaji&Sudarsono. *pengaruh diferensiasi upah antar propinsi terhadap kesempatan kerja*. Jurnal Ekonomi pembangunan hal 117-127 tahun 2004

<sup>39</sup> Bambang setiaji& Sudarsono. "*Pengaruh diferensiasi upah antar propinsi terhadap kesempatan kerja*". Jurnal Ekonomi pembangunan. Desember tahun 2004.p 117-124

ini tidak selamanya menunjukkan tingkat upah yang terjadi di pasar kerja karena dalam pelaksanaannya terdapat campur tangan pemerintah atau karena ada yang menentukan tingkat upah minimum. Dalam jangka panjang, sebagian pengurangan permintaan pekerja bersumber dari berkurangnya jumlah perusahaan, dan sebagian lagi bersumber dari perubahan jumlah pekerja yang diserap masing-masing perusahaan. Jumlah perusahaan bisa berkurang karena pemberlakuan tingkat upah minimum tidak bisa ditanggung oleh semua perusahaan. Hanya perusahaan yang sanggup menanggung upah minimum atau yang bisa mensiasati peraturan itu yang akan bertahan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Op.,cit p35

Tabel II.2 Upah Minimum Provinsi Tahun 2007-2009 (Rupiah)

Provinsi	Tingkat Upah Minimum Provinsi		
	2007	2008	2009
N.A.D	850.000	1.000.000	1.200.000
SUMBAR	725.000	800.000	880.000
RIAU	710.000	800.000	901.600
JAMBI	658.000	813.000	850.000
BENGGULU	644.838	690.000	735.000
LAMPUNG	555.000	617.000	691.000
YOGYAKARTA	500.000	586.000	700.000
BALI	622.000	682.650	760.000
NTB	645.000	730.000	832.500
NTT	600.000	650.000	725.000
KALBAR	560.000	645.000	705.000
KALSEL	745.000	825.000	930.000
KALTENG	665.973	765.868	873.089
KALTIM	766.500	889.654	955.000
MALUKU	635.000	700.000	775.000
MALUT	660.000	700.000	770.000
GORONTALO	560.000	600.000	675.000
SULUT	750.000	845.000	929.500
SULTRA	640.000	700.000	770.000
SULTENG	615.000	760.500	909.400
PAPUA	987.000	1.105.500	1.216.100

### 3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk pencapaian kualitas maupun produktivitas tinggi pada sumber daya manusia, dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan keterampilan dalam bekerja dan pada akhirnya akan mencapai kesejahteraan. Dewasa ini banyak

lontaran kritik terhadap sistem pendidikan yang pada dasarnya mengatakan bahwa perluasan kesempatan belajar cenderung telah menyebabkan bertambahnya pengangguran tenaga terdidik dari pada bertambahnya tenaga produktif yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:232),:

“Pendidikan berasal dari kata “*didik*”, lalu diberikan awalan kata “*me*” sehingga menjadi “*mendidik*” yang artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pemikiran.

Beberapa pengertian pendidikan, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>41</sup>.

*John Dewey* mengatakan bahwa:

“Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual, emosional ke arah alam dan sesama manusia”

*M.J. Longeveled* mengatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha , pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.”

*Ki Hajar Dewantara* mengatakan bahwa:

“Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.”

*Edgar Dalle* mengatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang

---

<sup>41</sup> Hartoto, *Pengertian pendidikan*.2009. <http://fatamorghana.wordpress.com> Hartoto-Pengertian-Pendidikan (diakses tanggal 7 januari 2011)

hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.”

#### Pengertian Pendidikan Menurut Undang-Undang dan GBHN

*UU No. 2 tahun 1989 adalah:*

“Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang.”

*UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional*

“Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

*Menurut GBHN*

“Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.”

Dari beberapa pengertian pendidikan di atas, pada dasarnya pengertian pendidikan yang dikemukakan memiliki kesamaan yaitu usaha sadar, terencana, sistematis, berlangsung terus-menerus, dan menuju kedewasaan.

Berangkat dari asumsi bahwa bertambahnya tingkat pengangguran disebabkan karena kegagalan sistem pendidikan, maka diperlukan adanya pendekatan-pendekatan tertentu dalam pendidikan dan konsep Link and Match perlu dihidupkan kembali dalam sistem pendidikan. pendidikan pada dasarnya merupakan sesuatu yang kongkret, spontan, dan tidak direncanakan tetapi langsung berhubungan dengan keperluan hidup. Dengan kata lain, dalam situasi

yang belum mengenal sistem sekolah, sifat pendidikan pada dasarnya selalu bersifat (*linked and matched*) atau keterkaitan dan kesepadanan.

Menurut teori *human capital* memandang bahwa pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia yang tidak kalah pentingnya dengan investasi modal fisik. Menurut teori ini:

“SDM (pendidikan) dianggap sebagai *capital goods* yang menentukan upaya pencapaian manfaat dan produktivitas sebagaimana bentuk-bentuk capital lainnya, seperti teknologi, mesin, tanah, uang dan sebagainya. Semakin tinggi pendidikan seseorang diharapkan akan menciptakan ekspektasi besar pada pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas kerjanya jika sudah demikian berarti menandakan pertumbuhan ekonomi yang baik dan pada akhirnya akan mengurangi pengangguran.”<sup>42</sup>

Menurut Adam Smith (1776) mengatakan bahwa:

“keterampilan kerja merupakan kekuatan yang dominan bagi industry”<sup>43</sup>

Sehingga di harapkan apabila individu/pekerja memiliki keterampilan tinggi dapat meningkatkan produktivitas kerjanya yang pada akhirnya akan mempertahankan mereka pada posisi kerja yang aman dalam sebuah perusahaan serta kesejahteraan pun dapat dicapai.

Alfred Marshall (1961) menerima pendapat Adam Smith bahwa:

“Manusia terdidik mungkin dapat disetarakan dengan harga mesin yang sangat mahal dan SDM merupakan suatu bentuk *capital*”

Kemajuan perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas dari SDM yang mampu bekerja dengan terampil dan baik, untuk itu pendidikan sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa ini. Pendidikan yang rendah akan menurunkan kinerja bahkan akan merugikan perusahaan, penciptaan kemiskinan

---

<sup>42</sup> Perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia, BPS h106

<sup>43</sup> Ibid., p28

dan buuruknya pertumbuhan ekonomi.oleh karenanya pendidikan merupakan hal penting untuk persaingan global saat ini.

Hal ini sejalan dengan pendapat Dalam McKeown (dalam Sindhunata ,2000) yang mengatakan bahwa *sustainable development* adalah:

*“Sustainable development is development that meets the needs of the present without comprimising the ability of future generations to meet their own needs.”*

Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. Di sisi lain, dengan pendidikan, usaha pembangunan yang lebih hijau (*greener development*) dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan juga mudah tercapai.<sup>44</sup>

Secara umum masyarakat di Indonesia menyadari pentingnya pendidikan, namun keinginan penduduk untuk meningkatkan pendidikan seringkali berbenturan dengan berbagai keterbatasan utamanya dari sisi pembiayaan. Ada juga sebagian masyarakat yang memandang bahwa setiap SDM harus diberdayakan untuk membiayai kehidupan keluarga, sehingga adakalanya ditemukan anak usia sekolah tapi kegiatan utamanya adalah bekerja.

Minimnya investasi pendidikan di Indonesia pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia. Hingga februari 2008, sekitar 73,93% tenaga kerja Indonesia masih berpendidikan rendah, hanya

---

<sup>44</sup> Sindhunata (ed). 2000. Menggegas Paradigma Baru Pendidikan: Demokrasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi. Yogyakarta: Kanisius

5,58 % tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. Pendidikan tinggi juga tidak menjamin kemudahan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Ini tercermin dari struktur penganggur dimana sekitar 12,16% diantaranya merupakan penduduk berpendidikan tinggi. Kesulitan kelompok terdidik dalam mendapatkan pekerjaan bisa terkait dua sebab, pertama si pencari kerja terdidik yang terlalu selektif dalam memilih pekerjaan, kedua karena lapangan pekerjaan yang ditawarkan kurang sesuai dengan kelompok terdidik.

Menurut Mark Blaug “Pendidikan meningkatkan aspirasi orang yang terdidik sehingga mereka tidak mungkin lagi terpuaskan.”<sup>45</sup>

Study yang dilakukan Remi Clignet di Afrika menunjukkan bahwa:

“Semakin terdidik seseorang, semakin besar harapannya pada jenis pekerjaan yang aman. Pekerja terdidik lebih suka bekerja pada perusahaan besar daripada membuka usaha sendiri. Mereka menilai tinggi pekerjaan yang stabil daripada pekerjaan yang beresiko tinggi.”<sup>46</sup>

Mengingat bahwa Indonesia hingga saat ini masih terbelakang dalam pembangunan ekonomi dibandingkan dengan Negara maju, sebagian penduduknya masih berpendidikan rendah dan bahkan diantaranya banyak yang tidak menyelesaikan SD, sedangkan sebagian besar pekerja dari sektor informal seperti UMKM adalah para pekerja yang berpendidikan rendah. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Mark Blaug, “ pendidikan dan lapangan kerja: beberapa asumsi umum” dalam jurnal ekonomi oleh Iwan Prasodjo “pengangguran dan setengah pengangguran di perkotaan” h63

<sup>46</sup> ibid

<sup>47</sup> Tambunan, Tulus. UMKM di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

Bagi pengusaha yang memiliki tingkat pendidikan tinggi pada lapangan usaha jasa pendidikan maupun jasa kesehatan dan kegiatan sosial pada umumnya terkategori sebagai pengusaha dengan *Emotion Modalities*. Yaitu orang yang mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pengusaha dengan banyak mempelajari keilmuan (akademik) yang berkaitan dengan dunia usaha. dalam kategori ini ada pengusaha yang langsung memulai usahanya (merasa cukup dengan dasar-dasar keilmuan yang dimiliki) dan ada yang bekerja terlebih dahulu untuk memahami dunia usaha secara riil.<sup>48</sup>

Berdasarkan fenomena sekarang ini adanya ketertinggalan didalam mutu pendidikan. Baik pendidikan formal maupun informal. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, dan mahalnnya biaya pendidikan.<sup>49</sup>

. Hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan

---

<sup>48</sup> Muhandiri, 2002 dalam analisis ketenagakerjaan BPS 2006

<sup>49</sup> Ganis, "masalah pendidikan di Indonesia" <http://ganis.student.umm.ac.id/2010/01/26/mahalnya-biaya-sekolah-di-masa-sekarang/> (diakses pada tanggal 27 maret 2011)

keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang Pendidikan.

Menurut BPS tingkatan pendidikan masyarakat Indonesia adalah:

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

1) Tidak tamat SD: Mereka yang tidak sekolah/belum pernah sekolah atau mereka yang pernah sekolah/tidak tamat di sekolah dasar 5/6/7 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan anak oleh Masyarakat Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 - A100. Mereka yang tamat Sekolah Dasar 3 tahun atau sederajat dianggap belum tamat.

2) SD & sederajat: Mereka yang tamat sekolah dasar 5/6/7 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan anak oleh Masyarakat Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 - A100.

3) SLTP & sederajat: Mereka yang tamat SMP, MULO, HBS 3 tahun, SLB Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Kepandaian Putri, SMEP, ST, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Ketrampilan Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu, Pendidikan Guru Agama 4 tahun, Kursus Pegawai Administrasi, Kursus Karyawan Perusahaan, dan Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama.

4) SLTA & sederajat: Mereka yang tamat dari Sekolah Menengah Atas, HBS 5 tahun, AMS, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Pekerjaan

Sosial, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, dan Sekolah Menengah Teknologi Grafika.

5) DI / DII: Mereka yang tamat Sekolah Guru Olah Raga, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama, Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru, Sekolah Analisis Menengah Kimia Atas, Sekolah Asisten Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas, Diploma I atau Diploma II pada suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta I dan Akta II termasuk dalam jenjang pendidikan program Diploma I atau Diploma II.

6) Sarjana Muda/ DIII: Mereka yang tamat Akademi/Diploma III/Akta III atau yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu fakultas. Bagi mereka yang telah menempuh pendidikan sampai semester 8/9 dan belum tamat di fakultas yang tidak mengeluarkan gelar sarjana muda, dinyatakan sebagai tamatan SLTA & sederajat.

7) DIV, S1 atau Lebih: Mereka yang tamat program pendidikan Diploma IV, Sarjana (Strata-1), Magister (Strata-2), dan Doktor

Namun, Pendidikan sekarang ini telah dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan golongan masyarakat. Bertambahnya sekolah-sekolah di Indonesia menandakan kesadaran manusia Indonesia untuk berpendidikan semakin tinggi. Keinginan untuk hidup maju dan untuk hidup lebih baik di masa yang akan datang menjadi motivasi yang sulit untuk diingkari. Berbagai harapan tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan jaman dan semakin tingginya jenjang pendidikan. Meskipun untuk jumlah penduduk yang bersekolah meningkat setiap tahunnya di 21 provinsi di Indonesia, untuk jumlah penduduk lulusan pendidikan (SD-UNIVERSITAS) sejak tahun 2007-2009 Hal ini dapat tercermin melalui tabel berikut:

Tabel II.3 Tingkat pendidikan berdasarkan jumlah lulusan (SD-UNIVERSITAS) Tahun2007

provinsi	Tingkat Pendidikan (lulusan) tahun2007			
	SD	SLTP	SLTA	UNIV
NAD	73218	50410	69354	1273
SUMBAR	79655	61528	32786	2270
RIAU	82426	55090	22893	1050
JAMBI	48352	33387	13462	483
BENGKULU	31928	17092	10423	513
LAMPUNG	152697	87842	32059	1480
YOGYAKARTA	45060	40251	21179	2977
BALI	54135	43780	24082	1566
NTB	86308	41167	21068	618
NTT	79079	48670	18815	658
KALBAR	81338	48393	16667	575
KALSEL	52736	25476	12444	875
KALTENG	40702	18588	8361	467
KALTIM	52458	35033	15477	1038
MALUKU	27499	19469	13659	685
MALUT	19898	10571	5309	308

GORONTALO	18954	6364	3183	414
SULUT	34862	27528	13412	1012
SULTRA	43152	30897	14292	1134
SULTENG	40277	23439	10669	369
PAPUA	31277	26478	9017	506

Tabel II.4 Tingkat pendidikan berdasarkan jumlah lulusan (SD-  
UNIVERSITAS) Tahun2008

provinsi	Tingkat Pendidikan (lulusan) tahun 2008			
	SD	SLTP	SLTA	UNIV
NAD	77540	64920	29967	1273
SUMBAR	85622	56064	31103	2270
RIAU	85891	53751	24277	1050
JAMBI	49785	30413	13948	3816
BENGGULU	29991	23340	9800	887
LAMPUNG	152147	85520	33119	1480
YOGYAKARTA	44872	42622	19914	2977
BALI	53233	45001	23600	1566
NTB	81375	47169	19469	618
NTT	81507	53807	19644	658
KALBAR	81605	49468	18634	575
KALSEL	52310	27293	11847	875
KALTENG	40952	19551	9286	476
KALTIM	52705	38881	16421	1038
MALUKU	29197	18851	14885	685
MALUT	19898	10133	5331	308
GORONTALO	18564	8852	3701	414
SULUT	35253	29644	13470	1012
SULTRA	47811	29324	15766	1134
SULTENG	41141	24302	11076	369
PAPUA	30769	24906	10540	3494

Tabel II.5 Tingkat pendidikan berdasarkan Jumlah lulusan (SD-UNIVERSITAS)

Tahun2009

provinsi	Tingkat Pendidikan (lulusan) tahun 2009				
	SD	SLTP	SLTA	D3	UNIV
NAD	41549	49409	52493	4169	4648
SUMBAR	47818	40611	183336	5760	11160
RIAU	39687	42019	61522	5978	4639
KEPRI	23899	16391	29402	1085	3816
JAMBI	10711	8058	9736	1548	1060
BENGKULU	62511	66422	80919	4790	677
LAMPUNG	10602	20222	39173	7157	4183
YOGYAKARTA	14288	16670	28384	3517	13711
BALI	46949	38672	38255	1752	5057
NTB	16120	9789	23508	3469	2169
NTT	52505	33064	37138	2937	2020
KALBAR	37824	22089	25757	1083	1982
KALSEL	14198	12217	13646	547	2156
KALTENG	25395	43982	56622	3602	1536
KALTIM	22148	8170	30362	377	4226
MALUKU	11436	7592	10991	1336	1580
MALUT	9217	6154	6810	323	397
GORONTALO	25600	26011	62657	914	1311
SULUT	14820	18623	26448	1126	4056
SULTRA	25180	10715	21144	1234	2195
SULTENG	5738	2915	3595	396	2087
PAPUA	7312	10100	18043	1333	1705

## 2.1 Review Penelitian Terdahulu

1. Judul: *Pengangguran di Indonesia: suatu Analisis data sensus*<sup>50</sup>  
 Oleh : Iwan prasodjo  
 Sifat: Jurnal Kependudukan 1980  
 Tujuan: - Mengetahui pertumbuhan ekonomi penduduk melalui  
 Tingkat Pengangguran di Kota dan Pedesaan  
 - Mengetahui kontribusi Pendidikan dalam pertumbuhan  
 ekonomi penduduk  
 Metode Penelitian : dengan mengambil data time series  
 Hasil: Bahwa dengan meningkatnya tingkat pendidikan, terutama pada  
 kelompok umur muda, cenderung mempengaruhi mereka untuk bekerja  
 d luar rumah tangga, memasuki sektor-sektor formal dan memilih  
 pekerjaan yang dianggap sesuai. Juga membuat mereka segan memulai  
 dengan pekerjaan yang relative “di bawah” dibandingkan dengan  
 tingkat pendidikan yang dimilikinya.
2. Judul : *Higher education and unemployment in Europe: An analysis of  
 the academic subject and national effect*  
 Oleh : Imanol Nunez and Ilias Livanos  
 Sifat : Jurnal Pendidikan  
 Tujuan : mengkaji dampak dari gelar akademik dan bidang studi pendek  
 dan pengangguran jangka panjang di seluruh Eropa (EU15)  
 Metode Penelitian : Survei Angkatan Kerja (LFS)

---

<sup>50</sup> Iwan prasodjo. *Pengangguran di Indonesia: suatu analisis data sensus*. Jurnal kependudukan tahun 1980

Hasil : menemukan hasil bahwa selama dekade terakhir jumlah lulusan memasuki pasar tenaga kerja telah meningkat secara signifikan (OECD, 2006)<sup>51</sup>. Dan menghasilkan kesimpulan bahwa sebagian besar pengangguran di Eropa adalah merupakan lulusan perguruan tinggi dibanding dengan pendidikan rendah, penelitian ini awalnya sangat berpacu pada teori bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan mengurangi pengangguran di negaranya. Ekspansi yang cepat dari pendidikan tinggi telah menghasilkan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya pekerja terampil tinggi dengan prospek kerja yang telah menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dulu beberapa dekade yang lalu. Menemukan kerja telah menjadi lebih sulit daripada pengangguran sebelumnya dan pascasarjana meningkat cepat (OECD, 2006).<sup>52</sup>

3. Judul : Penetapan upah minimum dalam kaitannya dengan upaya perlindungan bagi pekerja/ Buruh dan perkembangan perusahaan.

Oleh : Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH

Sifat : Thesis

Tujuan : - untuk mengungkap prosedur penetapan upah minimum

- untuk mengetahui sejauh mana penetapan upah minimum dalam memberi perlindungan bagi pekerja
- untuk menganalisis dampak penetapan upah minimum terhadap perkembangan perusahaan

---

<sup>51</sup> OECD (2006) Jobs Strategy: Lessons from a Decade's Experience. OECD, Paris.

<sup>52</sup> Ibid.,

Metode Penelitian : mencari informasi langsung terhadap buruh dan *study* pustaka, kuantitatif

Hasil : Setiap Perusahaan sudah mempunyai prediksi kemungkinan kenaikan Upah Minimum yang selanjutnya prediksi tersebut dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Dengan penyusunan prediksi kenaikan Upah Minimum tersebut maka diharapkan perusahaan dapat melakukan proses produksinya untuk mencapai target dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Namun pengusaha yang merasa tidak mampu memberikan upah kepada pekerja/buruhnya sesuai ketentuan ketetapan Upah Minimum tidak semuanya mengajukan permohonan penangguhan pemberlakuan Upah Minimum. Pengusaha mengabaikan ketentuan permohonan penangguhan Upah Minimum dikarenakan berbagai alasan diantaranya :

1. Pengusaha merasa malu dikatakan Perusahaannya dalam kondisi kesulitan likuiditas sehingga menurunkan tingkat kepercayaan konsumen.
2. Ada Pengusaha yang sebenarnya mampu memberlakukan Upah Minimum tetapi melakukan kecurangan dengan membuat laporan fiktif sehingga apabila mengajukan permohonan penangguhan pemberlakuan Upah Minimum takut kalau ketahuan.
3. Pengusaha khawatir apabila permohonannya justru ditolak oleh Pemerintah dan harus memberlakukan ketentuan Upah Minimum

4. Judul : “*Education and lifetime patterns of unemployment*”

Oleh: Nickell

Sifat : . *Journal of Political Economy*

Tujuan : - Mengetahui pengaruh pengangguran dalam perekonomian  
 - Mengetahui kontribusi dunia pendidikan dalam penciptaan produktivitas tinggi

Metode Penelitian: *Expos facto*

Hasil : Secara umum, pendidikan tinggi mengarah ke akumulasi modal manusia, yang terkait dengan produktivitas yang lebih tinggi. Perusahaan yang ingin mempertahankan tingkat produktivitas tinggi, sehingga mereka akan enggan untuk memberhentikan karyawan dengan keterampilan tinggi.<sup>53</sup>

5. Judul: *Job market signaling*

Oleh: Spence

Sifat: *Quarterly Journal of Economics (335-374)*

Metode Penelitian : *observe an upward trend on graduates*

Hasil Penelitian : Menemukan Teori sinyal dalam penelitiannya, yang berpendapat bahwa lulusan menyelesaikan gelar mereka karena kemampuan bawaan unggul. Oleh karena itu, derajat akademis mampu

---

<sup>53</sup> Nickell, S. (1973) Education and lifetime patterns of unemployment. *Journal of Political Economy* 87 (5), 117-131 (dalam jurnal ekonomi Imanol Nunez and Ilias Livanos “*Higher education and unemployment in Europe: An analysis of the academic subject and national effect.*”).

bertindak sebagai sinyal kemampuan tersebut, dan pengusaha lebih tertarik untuk menyewa pekerja tersebut.<sup>54</sup>

6. Judul : *pengaruh diferensiasi upah antar propinsi terhadap kesempatan kerja*<sup>55</sup>

Oleh : Bambang Setiaji dan Sudarsono

Sifat : Jurnal Ekonomi Pembangunan hal 117-127 tahun 2004

Tujuan: - Melihat pentingnya Upah minimum dalam suatu Negara  
- Melihat pemerataan pendapatan dalam suatu Negara

Metode Penelitian: Metode penelitian yang dilakukan dengan mengambil data panel

Hasil Penelitian : Menyatakan bahwa ternyata propinsi-propinsi yang melakukan diferensiasi upah atau tingkat upah yang berbeda-beda yang dihitung berdasarkan kebutuhan fisik minimum yang juga berbeda di setiap daerah tidak signifikan berpengaruh terhadap pengangguran di Indonesia.

5. Judul : *Upah buruh di Indonesia, suatu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia*<sup>56</sup>

Oleh : A. Joko purwoko

Sifat : Jurnal SDM no 3 tahun 1994

---

<sup>54</sup> Spence, M. (1973) Job market signalling. Quarterly Journal of Economics 87(3), 335-374. (dalam jurnal ekonomi Imanol Nunez and Ilias Livanos "Higher education and unemployment in Europe: An analysis of the academic subject and national effect."

<sup>55</sup> Bambang setiaji&Sudarsono. *pengaruh diferensiasi upah antar propinsi terhadap kesempatan kerja*.Jurnal Ekonomi pembangunan hal 117-127 tahun 2004

<sup>56</sup> A. Joko Purwoko. *Upah buruh di Indonesia, suatu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia*.Jurnal SDM no 3 tahun 1994

Tujuan : - Untuk mengetahui Seberapa jauh kebijakan Upah Minimum dapat menekan pengangguran

Metode Penelitian : melalui metode exspos facto

Hasil Penelitian : Bahwa kebijaksanaan pemerintah menetapkan upah minimum dengan standar kebutuhan fisik minimum sebenarnya kurang tepat, karena kurang memberikan penghargaan pada harkat dan martabat buruh serta nilai-nilai kemanusiaan jadi berdampak tidak langsung dengan pengangguran melainkan pada konflik-konflik yang kemudian menjurus kearah aksi-aksi mogok,unjuk rasa dsb sehingga tidak signifikan pengaruhnya pada pengangguran.

## **B. Kerangka berpikir**

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan indeks pertumbuhan manusia saat ini, memaksa pemerintah untuk selalu dapat bertahan didalam situasi apapun termasuk peningkatan kesejahteraan yang merupakan indicator dari pembangunan ekonomi, ditengah fenomena melihat angkatan kerja yang semakin meningkat setiap tahunnya dan dengan kesempatan kerja yang terbatas. Kebijakan upah minimum diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. peralihan investor asing pada perusahaan yang memberikan upah tenaga kerja murah dan mengakibatkan perusahaan dapat gulung tikar,sampai kepada aksi mogok kerja. Pekerja yang memiliki pendidikan tinggi dengan produktivitas tinggi tidak akan tersingkir oleh arus pasar bebas seperti ini dan menjadi pengangguran

nonsukarela, sehingga dengan pendidikan tinggi diharapkan akan mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan.

Menurun atau meningkatnya jumlah pengangguran terbuka di Indonesia menjadi indikator kesejahteraan masyarakatnya yang dapat tercermin melalui penghasilan/upah setiap bulannya dan SDM yang berkualitas. Untuk dapat berkualitas salah satunya seseorang harus dapat menempuh jenjang pendidikan agar dapat meningkatkan produktivitas kerjanya maupun dapat berpikir kreatif.

Berdasarkan dugaan sementara bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat upah minimum provinsi dan tingkat pendidikan terhadap pengangguran di Indonesia saat ini.

### **C. Perumusan Hipotesis**

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sementara terhadap masalah yang ada, yaitu:

1. Terdapat pengaruh yang negatif antara tingkat upah minimum provinsi terhadap pengangguran di Indonesia.
2. Terdapat pengaruh yang negatif antara tingkat pendidikan terhadap pengangguran di Indonesia.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat upah minimum provinsi terhadap pengangguran di Indonesia.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti rumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui Pengaruh antara Tingkat upah minimum terhadap pengangguran di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara Tingkat pendidikan terhadap pengangguran di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh antara Tingkat upah minimum dan Tingkat pendidikan terhadap pengangguran di Indonesia

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu penelitian berlangsung pada tahun 2007-2009 berdasarkan data yang diperoleh di lembaga statistik, Alasan dilakukan penelitian pada waktu tersebut, karena keterbatasan data diikuti dengan meningkatnya jumlah pengangguran pada tahun 2007 dibanding tahun sebelumnya dengan Tingkat Pendidikan masyarakat yang semakin meningkat.

Penelitian akan dilakukan di 21 Provinsi di Indonesia. Ke 21 Provinsi tersebut dipilih karena provinsi-provinsi tersebut merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahunnya, provinsi-provinsi tersebut tidak mengalami pemekaran ketika kebijakan UMP diterapkan seperti provinsi-provinsi yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini,serta provinsi-

provinsi yang memiliki jumlah pengangguran terbesar di Indonesia dengan daya serap tenaga kerja terbanyak, dengan melihat fenomena yang terjadi belakangan ini banyak jumlah pengangguran meningkat di tahun 2007 yang dikarenakan angkatan kerja yang meningkat dan tidak didukung oleh kesempatan kerja yang memadai hal ini perlu perhatian serius dari pemerintah. Sehingga dirasakan sesuai dengan judul penelitian.

### C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *expos facto*, yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian menurut kebelakang untuk mengetahui faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Metode ini (*expos facto*) digunakan untuk memperoleh data sekunder.<sup>57</sup> dan dengan mengambil data sekunder yang diperoleh dari badan atau lembaga pengolah data. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan regresi berganda karena banyaknya faktor yang mempengaruhi variabel tak bebas.<sup>58</sup> yaitu pengangguran sebagai variabel terikat, tingkat upah sebagai variabel bebas pertama, tingkat pendidikan sebagai variabel bebas kedua. Metode ini dipilih karena masalah yang ditemukan oleh peneliti merupakan masalah yang dapat diperoleh melalui data badan pusat statistic Jakarta kemenakertrans melalui data pada tahun 2007-2009 di 21 provinsi di Indonesia. untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara tingkat upah dan tingkat Pendidikan terhadap pengangguran.

---

<sup>57</sup> Sugiyono, metode penelitian bisnis, ( Jakarta: Alfabetha, 2004),p.7

<sup>58</sup> Damodar N. Gujarati, Dasar-dasar Ekonometrika jilid 1, (Jakarta: Erlangga,2006)

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yakni data pada tahun 2007-2009 di 21 Provinsi di Indonesia. Data yang dikumpulkan mencakup propinsi-propinsi di Indonesia dari tahun ke tahun. Dengan kata lain data yang digunakan adalah data panel, yang menggabungkan data *cross section* dan data *time series*. Data panel dipilih untuk melihat jumlah pengangguran di setiap provinsi yang merupakan variabel terikat atas variabel bebas tingkat upah dan tingkat pendidikan yang mempengaruhinya. Dengan demikian jumlah data adalah 63 dan sumber data diperoleh dari data angkatan kerja 21 provinsi setiap dalam tiga tahun yang bersumber pada data badan pusat statistik dan kemenakertrans.

#### **E. Operasionalisasi variabel Penelitian**

##### **1. Pengangguran (variabel Y)**

###### **a. Definisi Konseptual**

Pengangguran dapat diartikan sebagai penduduk yang mencari pekerjaan dimana seseorang dalam usia angkatan kerja (15 sampai dengan 64 tahun) yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun sedang aktif mencari pekerjaan.

###### **b. Definisi Operasional**

Variabel pengangguran merupakan variabel yang diambil melalui pengukuran pengangguran terbuka yang didalamnya merupakan penduduk yang termasuk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan atau bekerja selama kurang dari satu minggu penuh diukur dengan menggunakan data keadaan angkatan kerja di 21

Provinsi di Indonesia melalui survey Angkatan Kerja (Susenas). Variabel yang diteliti adalah data pengangguran terbuka tahun 2007-2009.

## 2. **Tingkat Upah Minimum**

### a. **Definisi konseptual**

Tingkat upah dalam penelitian ini adalah upah minimum provinsi (UMP) yaitu upah pokok belum termasuk tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada pekerja

### b. **Definisi Operasional**

Variabel tingkat upah minimum diukur dengan melihat faktor seperti Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja, Organisasi Buruh, Kemampuan untuk Membayar Produktivitas Kerja, Biaya Hidup, dan Pemerintah dengan melihat kebutuhan fisik minimum (KFM) nya di 21 provinsi di Indonesia. yang dilakukan oleh kemenakertrans. Variabel yang diteliti adalah data UMP tahun 2007-2009.

## 3. **Tingkat Pendidikan**

### a. **Definisi Konseptual**

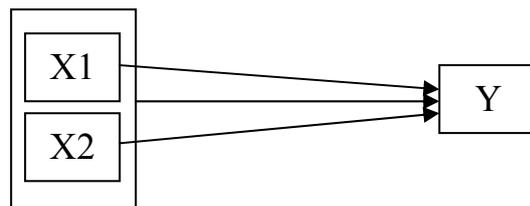
Tingkat pendidikan adalah tahapan-tahapan dalam pendidikan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mengurangi pengangguran. yakni pendidikan Perguruan Tinggi.

## b. Definisi Operasional

Variabel tingkat pendidikan diukur dengan menggunakan data jumlah lulusan pendidikan tinggi di 21 provinsi yang dilakukan oleh BPS melalui survey. Variabel yang diteliti adalah data jumlah lulusan pendidikan tinggi menurut status pada 21 provinsi tahun 2007-2009 di Indonesia.

## F. Konstelasi pengaruh antar variabel

Konstelasi pengaruh antar variabel dalam penelitian dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan arah atau gambaran dari penelitian ini, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

X1 : Tingkat upah minimum provinsi

X2 : Tingkat Pendidikan

Y : pengangguran

## G. Teknik Analisis Data

1. Mencari Persamaan Regresi :  $\hat{Y} = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \hat{\epsilon}$

Dimana:

X1 : variabel bebas 1 (tingkat upah minimum provinsi)

X2 : variabel bebas 2 (tingkat pendidikan)

$\hat{Y}$  : variabel terikat ( pengangguran)

$\alpha$  : konstanta

$\beta$  : tingkat kecenderungan

$\alpha$  dan  $\beta$  merupakan koefisien-koefisien regresi a dan b untuk regresi linier<sup>59</sup>

## 2. Uji Hipotesis

### a. Uji koefisien regresi parsial (uji t)

Berdasarkan hipotesis nol, variabel x tidak berpengaruh apapun

$$t = \frac{b_i}{ss(b_i)}$$

Ket: b = koefisien regresi i

Se= standar eror

### b. Uji koefisien regresi keseluruhan (uji F)

Uji F adalah uji signifikansi yang digunakan untuk menguji koefisien regresi peubah bebas secara keseluruhan atau simultan. Selain itu, uji F juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat atau tidak. Nilai F dapat hitung dengan rumus:<sup>60</sup>

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

<sup>59</sup> Sudjana, metode statistika edisi 6 ( Bandung : Tarsito, 2002) hlm.315

<sup>60</sup> Damodar N Gujarati, Dasar-dasar Ekonomertika jilid 2,( Jakarta :Erlangga,2007),p.69

Dimana:

k: koefisien regresi

n: banyaknya data

Hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan tabel F sebagai F kritis, dengan ketentuan taraf signifikan ( $\alpha$ ) adalah 0,05. Dalam hal ini perlu ditentukan hipotesis nol dan hipotesis tandingannya:

Ho:  $B_1 = B_2 = 0$  (model regresi tidak berarti atau tidak signifikan)

Hi:  $B_1 \neq B_2 = 0$  (model regresi berarti atau signifikan)

kriteria pengujian:

- Terima Ho jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , artinya seluruh variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat
- Tolak Ho jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , artinya seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

#### c. Koefisien korelasi parsial (uji t)

Uji signifikansi koefisien korelasi parsial digunakan untuk menguji apakah hubungan yang terjadi itu berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi).

Untuk menentukan thitung Dapat dihitung dengan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-3}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Ket: r = koefisien korelasi parsial

n = jumlah data atau kasus

#### d. Perhitungan koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan kata lain,

koefisien determinasi menunjukkan ragam naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linear  $X_k$ . dalam hal ini ragam naik turunnya Y seluruhnya disebabkan oleh  $X_k$ . Perhitungan koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus:<sup>61</sup>

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Ket:

ESS(Explained of sum Squared):jumlah kuadrat yang dijelaskan

TSS(Total sum of squares):total jumlah kuadrat

Dimana nilai  $R^2$  terletak diantara 0 sampai dengan 1, nilai  $0 \leq R^2 \leq 1$ . Jika  $R^2 = 0$ , berarti variabel bebas tidak bisa menjelaskan variasi per Bahan variabel terikat, maka model dapat dikatakan buruk. Jika  $R^2 = 1$ , berarti variabel bebas mampu menjelaskan variasi perubahan variabel terikat dengan sempurna. Kondisi seperti dua hal tersebut hampir sulit diperoleh. Kecocokan model dapat dikatakan lebih baik kalau  $R^2$  semakin dekat dengan 1.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a) Multikolinearitas

Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan, di antaranya 1) dengan melihat *inflation factor* (VIF) pada model regresi, 2) dengan membandingkan nilai koefisien determinasi

---

<sup>61</sup> Nachrowi Djalal Nachrowi, et.al, penggunaan teknik Ekonometri, (Jakarta: RajaGarafindo Persada.2008),p.22

individual ( $r^2$ ) dengan nilai determinasi serentak ( $R^2$ ), dan dengan melihat nilai *eigenvalue* dan *condition index*. pada uji ini menggunakan nilai VIF pada model regresi. Menurut santoso (2001), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas.<sup>62</sup>

Multikolinieritas itu bersifat spesifik sampel; kolinearitas merupakan fenomena sampel.<sup>63</sup>

Multikolinieritas adalah dengan *variance inflation factor* (VIF). Menghitung *Variance inflation factor* untuk koefisien dengan menggunakan rumus:<sup>64</sup>

$$VIF = \frac{1}{(1 - R_j^2)}$$

Dimana: 1 = koefisien determinan pada *auxillary regression*

Menganalisis derajat multikolinieritas dengan cara mengevaluasi nilai VIF. Semakin tinggi VIF suatu variabel tertentu, semakin tinggi varian koefisien estimasi pada variabel tersebut (dengan asumsi varian *error term* adalah konstan). Dengan demikian, semakin berat dampak dari multikolinieritas. Pada umumnya, multikolinieritas dikatakan berat apabila angka VIF dari suatu variabel dari suatu variabel melebihi 10.

Multikolinieritas adalah pertanyaan tentang derajat dan bukan tentang jenis. Perbedaan yang bermakna bukanlah tentang keberadaan multikolinieritas, melainkan tentang derajatnya.

---

62 Dwi Priyatno, "Mandiri belajar SPSS"(Yogyakarta:mediakom,2008),p.39

63 Jan Kmenta, Elements of econometrics, edisi ke-2, macmillan, New York,1986,p.431

64 Sarwoko, dasar-dasar Ekonomertika (Yogyakarta: ANDI, 2005),P.120

b.) Heteroskedastisitas

Uji terhadap ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan ujian korelasi *Rank Spearman* atau melihat pola grafik regresi. Untuk menghitung koefisien regresi penduga Rank Spearman dengan menggunakan rumus:<sup>65</sup>

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana:

$r$  = perbedaan setiap pasang rank

$n$  = jumlah pasang rank

Bila mendekati  $\pm$  maka kemungkinan besar terdapat heteroskedastisitas, sedangkan bila mendekati 0 maka kemungkinan adanya heteroskedastisitas kecil. Dalam penelitian ini menggunakan pola grafik regresi dimana jika pola menyebar diatas dan dibawah 0 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

c.) Autokorelasi

Autokorelasi merupakan gangguan pada fungsi regresi yang berupa korelasi diantara faktor gangguan. Kemungkinan adanya autokorelasi antara nilai-nilai variabel  $\varepsilon$  yang berurutan. Dalam penelitian ini, uji untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin

---

<sup>65</sup> Ibid, p.107

Waston (Uji DW). Untuk menghitung besarnya nilai statistik DW menggunakan rumus.<sup>66</sup>

$$DW = \frac{\sum_{t=1}^{n-1} (e_t - e_{t+1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$$

Bandingkan nilai statistic DW dengan nilai teoritik DW sebagai berikut:

• untuk  $\rho > 0$  (autokorelasi positif):

1. Bila DW ( dengan df n- K-1); K adalah banyaknya variabel bebas yang digunakan; Ho diterima, jadi  $\rho = 0$  berarti tidak ada autokorelasi
2. Bila DW (dengan df n – K – 1); Ho ditolak, jadi  $\rho > 0$  berarti ada autokorelasi positif
3. Bila DW; uji itu hasilnya tidak konklusif, sehingga tidak dapat ditentukan apakah terdapat autokorelasi atau tidak.

• untuk  $\rho < 0$  (autokorelasi negatif):

- 1.) Bila ( 4 – DW ); Ho diterima, jadi  $\rho = 0$  berarti tidak ada autokorelasi
- 2.) Bila ( 4 – DW ) ; Ho ditolak, jadi  $\rho < 0$  berarti ada autokorelasi positif
- 3.) Bila (4 – DW); uji itu hasilnya tidak konklusif, sehingga tidak dapat ditentukan apakah terdapat autokorelasi atau tidak.

<sup>66</sup> Muhammad firdaus, Ekonometrika suatu pendekatan Aplikatif, ( Jakarta: Bumi aksara, 2004),p.101

d.) Uji Normalitas

Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal, para peneliti menggunakan pedoman jika tiap variabel terdiri atas 30 data, maka data sudah berdistribusi normal. Apabila analisis melibatkan 3 variabel, maka diperlukan data sebanyak  $3 \times 30 = 90$ . Untuk menguji lebih akurat diperlukan alat analisis SPSS yaitu dengan histogram dan uji kolmogorov-smirnov test.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Variabel yang ada dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi, dalam penelitian ini adalah tingkat upah dalam upah minimum provinsi dan tingkat pendidikan Universitas di 21 provinsi. Untuk variabel terikatnya, yaitu variabel yang dipengaruhi, dalam penelitian ini adalah pengangguran Terbuka di 21 provinsi di Indonesia

##### **1. Data Tingkat Upah Minimum**

Data Tingkat Upah yang diukur dari upah minimum provinsi mempunyai peranan dan fungsi cukup besar meningkatkan produktivitas pekerja serta merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki nasib pekerja yang berpenghasilan rendah. Tingkat upah dalam penelitian ini diperoleh dari data yang ada di kementerian tenaga kerja dan transmigrasi mengenai Upah minimum provinsi yang terdapat di 21 provinsi di Indonesia. Selama tahun 2007 s/d 2009 tingkat upah minimum provinsi di Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel IV.1

## Upah Minimum Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2009 (rupiah)

Provinsi	Upah minimum Provinsi		
	2007	2008	2009
NAD	850,000	1,000,000	1,200,000
SUMBAR	725,000	800,000	880,000
RIAU	710,000	800,000	901,600
JAMBI	658,000	724,000	800,000
BENGKULU	644,838	690,000	735,000
LAMPUNG	555,000	617,000	691,000
YOGYAKARTA	500,000	586,000	700,000
BALI	622,000	682,650	760,000
NTB	645,000	730,000	832,500
NTT	600,000	650,000	725,000
KALBAR	560,000	645,000	705,000
KALSEL	745,000	825,000	930,000
KALTENG	665,973	765,868	873,089
KALTIM	766,500	889,654	955,000
MALUKU	635,000	700,000	775,000
MALUT	660,000	700,000	770,000
GORONTALO	560,000	600,000	675,000
SULUT	750,000	845,000	929,500
SULTRA	640,000	700,000	770,000
SULTENG	615,000	670,000	720,000
PAPUA	987,000	1,105,500	1,216,100

Sumber: Kemenakertrans, Diolah

Dari tabel tersebut, dapat terlihat bahwa UMP di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terutama pada tahun 2009. Kenaikan UMP setiap tahunnya disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan banyak faktor yang mendukung didalamnya seperti inflasi. Dalam tabel terlihat upah tertinggi dimiliki oleh provinsi Papua dimana provinsi ini mengalami peningkatan tingkat upah tertinggi setiap tahunnya

hal ini disebabkan karena provinsi ini memiliki jumlah penduduk yang sedikit dibanding provinsi lainnya, sedangkan tingkat upah minimum terendah adalah provinsi yogyakarta, tinggi rendahnya tingkat upah minimum memang disesuaikan dengan kebutuhan fisik minimum dengan memperhatikan banyak faktor seperti inflasi dan jumlah penduduk didalamnya. Diharapkan dengan meningkatnya UMP setiap tahunnya dapat ,meningkatkan kesejahteraan pekerja yang sebelumnya berpenghasilan rendah sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja.

## 2. Data Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melihat data ketenagakerjaan terutama mengenai tingkat pendidikan berdasarkan jumlah lulusan di 21 Provinsi di Indonesia. Data tingkat pendidikan yang diambil adalah data jumlah lulusan pendidikan Universitas Selama tahun 2007 s/d 2009. Data tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel IV.2 Tingkat pendidikan tinggi (lulusan) Tahun2007

<b>provinsi</b>	<b>Tingkat Pendidikan Tinggi (lulusan) tahun 2007</b>
	<b>UNIV</b>
N.A.D	7.638198244
SUMBAR	8.561784075
RIAU	7.626082758
JAMBI	7.170119545
BENGKULU	6.767343125
LAMPUNG	8.284504227
YOGYAKARTA	9.434123719
BALI	7.869019376
NTB	7.558516743
NTT	7.312553498
KALBAR	7.263329617
KALSEL	7.46221494
KALTENG	6.745236349
KALTIM	7.509883061
MALUKU	6.92951677
MALUT	6.472346295
GORONTALO	6.561030666
SULUT	7.3737431
SULTRA	7.895436007
SULTENG	7.061334367
PAPUA	6.954638865

Tabel IV.3 Tingkat pendidikan tinggi (lulusan) Tahun2008

<b>provinsi</b>	<b>Tingkat Pendidikan Tinggi (lulusan) tahun 2008</b>
	<b>UNIV</b>
N.A.D	7.812378208
SUMBAR	8.800264651
RIAU	7.837554361
JAMBI	7.429520843
BENGGULU	6.950814768
LAMPUNG	8.543835122
YOGYAKARTA	7.911324019
BALI	8.048468744
NTB	7.558516743
NTT	8.125039097
KALBAR	7.513163545
KALSEL	7,676937146
KALTENG	6.943122423
KALTIM	7.699842407
MALUKU	7.081708586
MALUT	6.697034248
GORONTALO	6.745236349
SULUT	8.146419323
SULTRA	7.539027056
SULTENG	7.340186835
PAPUA	7.177018766

Tabel IV.4 Tingkat pendidikan tinggi (lulusan) Tahun2009

<b>provinsi</b>	<b>Tingkat Pendidikan Tinggi (lulusan) tahun 2009</b>
	<b>UNIV</b>
N.A.D	9.071193241
SUMBAR	9.982437356
RIAU	8.872066513
JAMBI	8.129174997
BENGKULU	8.034955025
LAMPUNG	9.2425117104
YOGYAKARTA	10.92565067
BALI	8.9503436
NTB	8.365439636
NTT	8.786303878
KALBAR	8.41803562
KALSEL	8.394347361
KALTENG	7.820439515
KALTIM	8.724366949
MALUKU	7.439559309
MALUT	7.439559309
GORONTALO	8.327967858
SULUT	8.498621806
SULTRA	8.513787398
SULTENG	8.3313852267
PAPUA	8.018296139

*Sumber: BPS, Diolah*

Dari tabel tersebut, dapat terlihat bahwa Tingkat pendidikan di Indonesia dari tahun 2007 sampai tahun 2009 meningkat di setiap provinsinya. Provinsi yang cenderung memiliki penduduk dengan jumlah lulusan pendidikan tinggi tertinggi adalah yogyakarta sebesar 9.434123719 lulusan. Kenaikan tersebut disebabkan karena mereka yang berpendidikan

tinggi masih dalam proses mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang dimiliki.

### 3. Data Pengangguran

Data Pengangguran dalam penelitian ini dibatasi pada pengangguran terbuka yang termasuk angkatan kerja. Data pengangguran diperoleh dari laporan pencatatan SAKERNAS di BPS mulai tahun 2007-2009.

Pengangguran (untuk semua bentuk) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan dipandang sebagai ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja. Kondisi ketenagakerjaan di 24 provinsi di Indonesia dapat terlihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.6**  
**Pengangguran Terbuka (yang termasuk angkatan kerja) di Indonesia**  
**Tahun 2007-2009 (ribu orang)**

Provinsi	Pengangguran Terbuka		
	2007	2008	2009
N.A.D	183822	163868	173624
RIAU	196308	208931	206471
JAMBI	84744	74222	69857
BENGKULU	44467	33285	46054
LAMPUNG	285929	230388	230942
YOGYAKARTA	118877	119785	122972
BALI	98305	95512	60405
NTB	159713	107795	12494
NTT	83568	81766	6516
KALBAR	154883	140561	127186
KALSEL	117226	118374	118406
KALTENG	55244	5162	49008
KALTIM	161925	142506	165087
MALUKU	76443	61231	61194
MALUT	33768	29338	29117
GORONTALO	29457	29809	23429
SULUT	141646	129302	114528
SULTRA	68689	58253	53067
SULTENG	77823	8843	63154
PAPUA	55121	51129	45023

*Sumber: BPS, Diolah*

Berdasarkan data diatas Perkembangan dari tahun ke tahun jumlah Pengangguran terbuka yang termasuk angkatan kerja di Indonesia rata-rata selalu mengalami penurunan. Dengan demikian, diharapkan akan mampu membantu dalam meningkatkan pergerakan perekonomian di Indonesia.

## **B. Analisis Data**

### **1. Persamaan Regresi**

Persamaan Regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan kuantitatif dari tingkat upah (X1) dan tingkat pendidikan (X2) terhadap

pengangguran (Y). Yang telah dihitung melalui program SPSS 19 Maka diperoleh persamaan Regresinya dan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel IV.7 Persamaan Regresi**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.198	7.827		1.175	.245
	UMP	-.061	.590	-.013	-103	.918
	PT	.367	.126	.358	2.905	.005

a. Dependent Variable: UNEMPLOYMENT

Berdasarkan tabel 4.4 di atas diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 9,198 - 0,061X_1 + 0,367X_2 + et$$

- Koefisien variabel UMP diatas sebesar -0,061 Menunjukkan bahwa ada hubungan yang negatif antara UMP dengan pengangguran, tetapi hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa jika UMP naik maka pengangguran akan menurun, secara teoritis jika UMP naik, maka pengusaha akan mengurangi karyawannya hal ini sesuai dengan teori produksi ,  $Q = f(L, K)$ , dimana pengusaha akan melakukan substitusi faktor produksi. Dan UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang jauh lebih mempengaruhi pengangguran yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

- Koefisien variabel jumlah lulusan pendidikan tinggi sebesar 0,367, hal ini artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan jumlah lulusan pendidikan tinggi mengalami peningkatan sebesar 1% maka pengangguran akan mengalami peningkatan sebesar 0,36 %. Koefisien bertanda positif, artinya terjadi hubungan positif antara tingkat pendidikan terhadap pengangguran, semakin tinggi tingkat pendidikan maka pengangguran akan semakin tinggi. Dan berpengaruh signifikan. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan.
- Dari model persamaan regresi tersebut diperoleh konstanta sebesar 9,198 hal ini berarti tanpa adanya variabel independen atau nilainya adalah 0, maka pengangguran sudah mencapai 9,198.

#### 1. Uji persyaratan Analisis

##### Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi baik variabel independen maupun variabel dependen memiliki distribusi data normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Uji statistik yang dapat digunakan dalam uji normalitas adalah uji kolmogorov-smirnov test data yang berdistribusi normal ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,05. Berikut merupakan tabel yang disajikan hasil dari *kolmogorov-smirnov test*

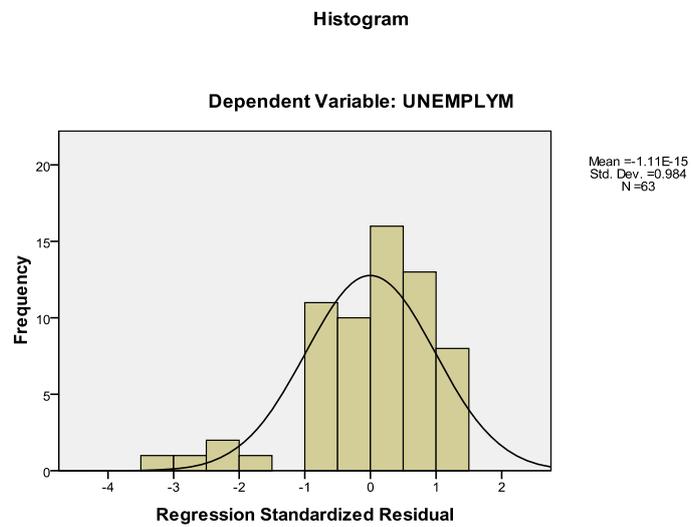
**Tabel IV.8 Uji Kolmogorov-smirnov****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
UNEMPLYM	.116	63	.056	.916	63	.000
UMP	.096	63	.200*	.970	63	.125
PT	.075	63	.200*	.952	63	.016

a. Lilliefors Significance Correction

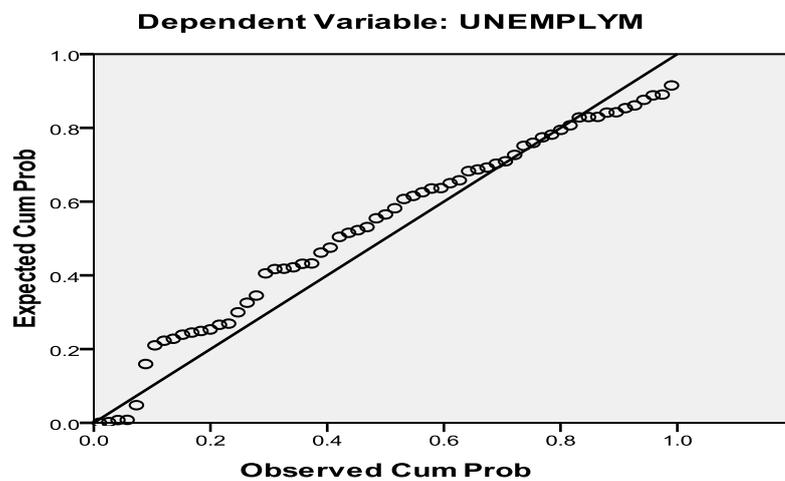
\*. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel IV.5 di atas nilai signifikansi tingkat upah (UMP) sebesar 0,200, dan nilai signifikansi tingkat pendidikan sebesar 0,200, sedangkan nilai signifikansi untuk pengangguran terbuka sebesar 0,056, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan yaitu tingkat upah minimum, tingkat pendidikan dan pengangguran, memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05 artinya data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki distribusi normal dan menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. Hasil di atas juga di dukung hasil grafik histogram maupun grafik normalitas probability plot-nya



**Gambar 4.1 Grafik histogram**

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



**Gambar 4.2 Normal Probability**

Dengan melihat grafik histogram dapat disimpulkan bahwa pola distribusi mendekati normal. Kemudian pada grafik normal plot terlihat titik-titik sebaran mendekati garis normal.

## 2. Uji Hipotesis

### a. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial di dalam menerangkan variasi dependen

**Tabel 4.10 Uji t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16555.332	7.827		1.175	.245
	UMP	-.061	.590	-.013	-.013	.918
	PT	.367	.126	.358	2.905	.005

a. Dependent variable: UNEMPLOYMENT

- Berdasarkan tabel IV.9 di atas variabel tingkat upah menghasilkan  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,013 <$  dari  $t_{tabel}$  sebesar  $1,671$ ,  $((df)n-k-1=59)$  karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara ump dengan pengangguran, jadi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Indonesia.
- Berdasarkan tabel IV.9 di atas variabel tingkat pendidikan menghasilkan  $t_{hitung}$  sebesar  $2.905 >$  dari  $t_{tabel}$  sebesar  $1,671$ , sehingga jika variabel maka  $H_0$  ditolak artinya tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia

### b. Uji F

Uji F atau uji koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.

Tabel IV.9 uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5.922	2	2.961	4.346	.017 <sup>a</sup>
Residual	40.878	60	.681		
Total	46.800	62			

a. Predictors: (Constant), PT, UMP

b. Dependent Variable: UNEMPLYM

Dari tabel IV.8 di atas dapat diketahui bahwa secara bersama-sama UMP dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran terbuka. Hal ini dibuktikan dari nilai Fhitung sebesar 4.436 lebih besar dr Ftabel 1,53 dengan signifikansi 0,017.karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Maka H<sub>0</sub> ditolak, sehingga dapat disimpulkan UMP dan tingkat pendidikan tinggi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran

### 3. Tabel 4.11 Uji koefisien korelasi parsial

		UNEMPLYM	UMP	PT
UNEMPLYM	Pearson Correlation	1	.061	.356**
	Sig. (2-tailed)		.638	.004
	N	63	63	63
UMP	Pearson Correlation	.061	1	.204
	Sig. (2-tailed)	.638		.108
	N	63	63	63
PT	Pearson Correlation	.356**	.204	1
	Sig. (2-tailed)	.004	.108	
	N	63	63	63

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### 4. Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)

Untuk mengetahui atau menguji goodness-fit dari model regresi yang dapat dilihat dari nilai R square. Untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tingkat upah (ump) dan tingkat pendidikan dapat dilihat melalui besarnya koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis determinasi diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel IV.12 Hasil Analisis determinasi  
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.356(a)	.127	.097	.82541

a. Predictors: (Constant), PT, UMP

b. Dependent Variable: UNEMPLYM

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R *Square* sebesar 0,127 atau (12,7%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (UMP dan TKPend) terhadap variabel dependen (pengangguran) sebesar 12,7%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (UMP dan TKPend) mampu menjelaskan sebesar 12,7 % variasi variabel dependen (pengangguran). Sedangkan sisanya sebesar 87,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

#### 5. Uji asumsi klasik

##### a. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang

dengan periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan statistic Run test dan uji Durbin –watson.

Tabel 4.13 Uji Durbin Watson

**Model Summary<sup>b</sup>****Model Summary(b)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.356(a)	.127	.097	36659.865	1.550

a Predictors: (Constant), PT, UMP

b Dependent Variable: UNEMPLOYMENT

Pada tabel diatas dapat diketahui nilai Durbin Watson menghasilkan regresi yaitu 1.550. sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n)=63, serta k=2 diperoleh nilai dL sebesar 1,391 dan du sebesar 1,600 Hal ini berarti berada pada daerah (menerima HO tidak ada autokorelasi). atau dengan kata lain Ho diterima, sehingga dinyatakan tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Berikut adalah kategori autokorelasi:

Dw	Kesimpulan
Kurang dari 1,1	Ada autokorelasi
1,1 – 1,54	Tanpa kesimpulan
1,55 – 2,46	Tidak ada autokorelasi
2,46 – 2,9	Tanpa kesimpulan
Lebih dari 2,91	Ada autokorelasi

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada uji durbin watson.

#### a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolonearitas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF).

Tabel 4.14 Hasil uji Multikolinearitas

**Coefficients(a)**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	UMP Tingkat Pendidikan (SD-UNIV)	.958	1.044
		.958	1.044

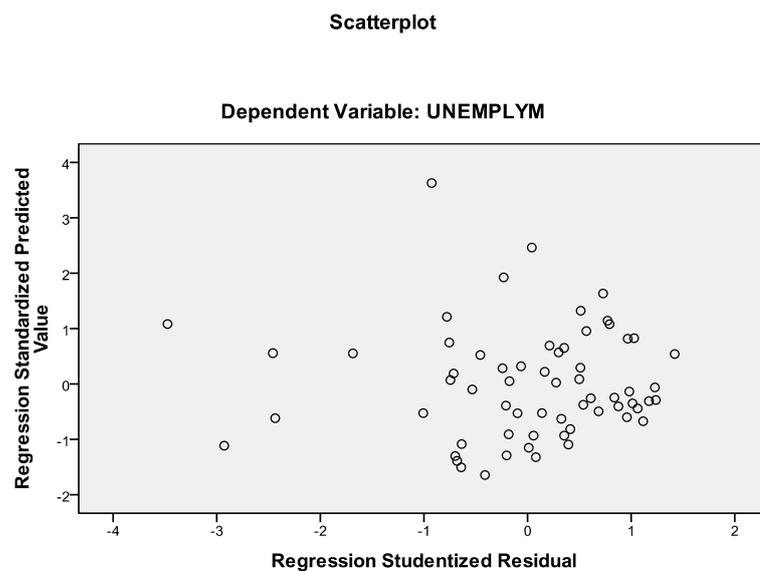
a Dependent Variable: UNEMPLOYMENT

Suatu model regresi dikatakan dinyatakan bebas dari multikolinearitas jika mempunyai nilai Tolerance dibawah 1 dan nilai VIF dibawah 10. Dari tabel dapat diketahui kedua variabel independen memiliki nilai tolerance sebesar 0,958 berada dibawah 1 dan nilai VIF sebesar 1.044 jauh dibawah angka 10. Hal ini menunjukkan data model ini tidak terjadi multikolinearitas.

### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Pada penelitian ini untuk menguji terjadinya heteroskedastisitas atau tidak menggunakan analisis grafis. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu dalam scatterplot antara variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dasar analisis grafis adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka mengindikasikan tidak terjadinya heteroskedastisitas.



**Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar diatas di atas terlihat bahwa titik-titik yang ada tidak membentuk suatu pola tertentu atau titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam penelitian ini model regresi yang dipakai tidak mengalami heteroskedastisitas.

### **C. Interpretasi Data**

Menurut Hasil perhitungan maka dapat diinterpretasikan bahwa model regresi yang digunakan sudah baik, terbebas dari penyakit asumsi Klasik. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan baik secara parsial ataupun secara bersama-sama.

Pola pengaruh antar ketiga variabel ini dinyatakan dengan persamaan regresi  $Y=9,198-0,061X_1+0,367X_2+e_t$ . Persamaan ini menyatakan bahwa :

Koefisien dari variabel tingkat upah minimum adalah -0,061 dan nilai tersebut adalah negatif dan hal ini sesuai dengan teori produksi,  $Q = f ( L, K )$  dimana perusahaan akan melakukan substitusi faktor produksi. dan tingkat upah minimum tidak berpengaruh signifikan mempengaruhi pengangguran di Indonesia, hal ini dikarenakan terdapat faktor lain yang jauh lebih mempengaruhi seperti adanya biaya tambahan perusahaan yang illegal untuk kelancaran produksi, investor asing enggan menanamkan sahamnya pada perusahaan yang menerapkan upah tinggi dan membayar mahal karyawannya, beralih pada usaha padat modal, dan faktor-faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Koefisien dari variabel pendidikan tinggi adalah 0,367 dan nilai tersebut adalah positif dan pendidikan tinggi signifikan mempengaruhi pengangguran di Indonesia. Artinya setiap jumlah lulusan dari tingkat pendidikan tinggi naik sebesar

1%, maka pengangguran di Indonesia naik 367 %. Hal ini tidak sesuai dengan pengajuan hipotesis yang menyatakan bahwa pengaruhnya adalah negatif terhadap pengangguran di Indonesia, hal ini dikarenakan semakin tinggi pendidikan seseorang diharapkan akan mampu mengurangi pengangguran namun kenyataannya adalah justru semakin banyak pengangguran tenaga terdidik di Indonesia saat ini, ini terjadi karena pengangguran dengan pendidikan yang tinggi akan masuk ke dalam pengangguran sukarela dimana mereka akan rela menganggur untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi yang disesuaikan dengan bidang yang benar-benar dikuasai, hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu.

Nilai konstanta sebesar 9.198 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel bebas dianggap konstan, maka rata-rata pengangguran akan mengalami angka yang positif sebesar 9.198 orang. Dengan kata lain, jika tidak ada peningkatan tingkat upah dan tingkat pendidikan maka pengangguran sebesar 9.198 orang di Indonesia.

Pada uji parsial tidak semua variabel yang signifikan, namun pada uji simultan semua variabel berpengaruh signifikan. Hal ini terjadi karena pada uji sendiri-sendiri akan ada variabel yang dianggap konstan atau tidak berubah ketika salah satu variabel yang lain di uji. Dengan memperhatikan kondisi masing-masing variabel yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sangat wajar terjadi semua variabel pada saat di uji parsial menjadi tidak signifikan. Namun, ketika di uji secara bersama semua variabel signifikan, hal ini lebih disebabkan jika ketika variabel diuji secara parsial salah satu variabel dianggap konstan maka apabila terdapat variabel yang terganggu kondisinya secara nyata dapat mempengaruhi tingkat signifikansinya.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Meskipun peneliti telah berhasil menguji hipotesis yang diajukan, namun disadari bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya sampai pada tingkat kebenaran mutlak, sehingga tidak menutup kemungkinan dilakukannya penelitian lanjutan. Hal tersebut disebabkan masih banyak terdapat keterbatasan dalam penelitian, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh peneliti, sehingga mempengaruhi ketepatan peneliti dalam mengelola dan menginterpretasikan data yang diperoleh.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder, artinya data mentah yang telah diolah oleh lembaga yang berwenang. Jika terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam pengelolaan data mentah tersebut, maka akan berpengaruh terhadap hasil penelitian, sehingga keakuratan data kurang terjamin.
3. Keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga serta kemampuan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, sehingga masih terdapat banyak kekurangan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dari data tahun 2007-2009 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat upah dan tingkat pendidikan terhadap pengangguran di Indonesia secara simultan, tetapi tidak secara parsial.

Berdasarkan penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tingkat upah minimum provinsi tidak signifikan mempengaruhi pengangguran di Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan tidak semua provinsi dengan sejumlah besar perusahaan didalamnya menerapkan secara benar-benar kebijakan upah minimum tersebut. Artinya banyak perusahaan yang tidak mau dirugikan dengan pemberian upah tinggi terhadap karyawannya sehingga banyak pekerja yang lebih kepada melakukan aksi mogok kerja dibandingkan harus kehilangan pekerjaannya serta ketidaksiapan perusahaan dalam penerapan kebijakan tersebut dapat membuat perusahaan melakukan substitusi faktor produksi. Kemudian, karena pengaruhnya tidak signifikan terhadap pengangguran maka dalam mempengaruhi penambahan jumlah pengangguran saat ini dipengaruhi oleh faktor lain seperti keinginan investor asing dalam menanamkan saham pada perusahaan yang membayar murah

pekerja, adanya biaya-biaya tambahan untuk produksi secara ilegal, dan faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

- 2) Tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka justru akan meningkatkan jumlah pengangguran terdidik di Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin terdidik seseorang semakin besar harapannya akan pekerjaan yang lebih baik dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan bekal ilmu yang dimiliki, namun rata-rata dari mereka memang hanya ingin mencari aman dan tidak mau mengambil resiko dengan menjadi wirausaha dan akhirnya bekerja pada sektor formal, yang pada kenyataannya jumlah lulusan pendidikan tinggi justru tidak terserap pada sektor tersebut yang bisa dikarenakan sistem pendidikan kita yang belum mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha terutama sektor formal tersebut.
- 3) Tingkat upah minimum dan tingkat pendidikan secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran di Indonesia namun tidak secara parsial. Hal ini dapat terjadi ketika salah satu variabel diuji secara parsial variabel lainnya dianggap konstan dan dimungkinkan adanya ekonomi biaya tinggi, sedangkan jika diuji secara simultan semua variabel diuji secara serentak.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, bahwa variabel tingkat upah dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa tingkat upah minimum dan tingkat pendidikan merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan di Indonesia terutama masalah pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang dapat tercermin dari banyaknya pengangguran. Namun, jika dilihat secara parsial variabel tingkat upah minimum tidak signifikan mempengaruhi pengangguran di Indonesia.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa:

- 1) Penetapan kebijakan upah minimum pada suatu Negara belum tentu dapat menambah jumlah pengangguran di Negara tersebut, banyak faktor lain yang jauh lebih besar pengaruhnya terhadap pengangguran di Indonesia, sehingga tujuan dari penetapan upah minimum tersebut yaitu pencapaian kesejahteraan pekerja dapat tercapai namun belum menyeluruh di setiap perusahaan/ provinsi yang menetapkan kebijakan tersebut.
- 2) Dari hasil pengolahan data terlihat bahwa jumlah lulusan tingkat pendidikan tinggi yang menganggur begitu besar dan relatif meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pada kenyataannya jumlah lulusan pendidikan tinggi belum mampu terserap pada sektor formal dikarenakan pendidikan yang mereka peroleh dari bangku kuliah tidak sesuai dengan realisasi atau kebutuhan dunia kerja saat ini dan ditambah lagi sbagian orang lulusan pendidikan tinggi selalu berpatokan

pada upah yang tinggi yang justru dihindari oleh sebagian besar perusahaan sektor formal. Namun hal ini juga menandakan masyarakat Indonesia sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan kinerja, produktivitas dan kualitas dari sumber daya manusia di Indonesia saat ini yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan pada akhirnya akan mengurangi pengangguran jika didukung oleh perbaikan sistem pendidikan dan kepedulian pemerintah akan masyarakat dengan pendidikan rendah yang dimiliki.

- 3) Melihat pengaruh UMP dan tingkat pendidikan hanya sebesar 12,7 % namun cukup berarti dalam mempengaruhi jumlah pengangguran di Indonesia maka pemerintah lebih memperhatikan lagi nasib para buruh dan memperbaiki sistem pendidikan agar jumlah lulusan dapat terserap pada pasar tenaga kerja serta menunjukkan kualitas SDM yang mampu bersaing.

### **C. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang dikemukakan, beberapa upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengurangan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia antara lain:

- 1) Penerapan kebijakan upah minimum provinsi sebaiknya benar-benar dipertimbangkan oleh setiap perusahaan pada masing-masing provinsi, jika dirasa belum mampu untuk menerapkan upah minimum sebaiknya jangan dulu diterapkan karena hal itu justru akan membuat perusahaan tidak siap dan pada akhirnya akan merumahkan banyak pekerja.

- 2) Sebaiknya institusi pendidikan tinggi memperbaiki sistem pendidikan agar disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat menciptakan lulusan yang siap kerja dan siap pakai serta agar lulusan tenaga terdidik mampu bersaing yang memang diciptakan untuk dapat membangun bangsa dengan keterampilan dan produktivitas tinggi yang merupakan indikator SDM yang berkualitas. Sehingga tidak menjadi beban bagi Negara.
- 3) Karena UMP dan jumlah lulusan PT tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap pengangguran, maka pemerintah Agar lebih berkonsentrasi terhadap faktor-faktor lain yang jauh lebih mempengaruhi jumlah pengangguran di Indonesia, agar dapat dilakukan penanganan sehingga pengangguran dapat ditekan dan menambah pekerjaan sektor formal hingga merata keseluruh provinsi agar tercipta pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alghofari, Farid. "Pengangguran di Indonesia". Jurnal ekonomi. tahun 2007 p50
- Amri Amir. "perkembangan tingkat upah di Indonesia", Jurnal Ilmiah ekonomika "Jurnal inflasi dan pengangguran di Indonesia" 2009 Uni. Jambi p28
- Adit agus prastyo. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan*. 2010  
.http://eprints.undip.ac.id/23026/1/skripsi\_full\_teks.pdf (diakses pada tanggal 16 januari 2012)
- Bambang setiaji dan Sudarsono. "Pengaruh diferensiasi upah antar propinsi terhadap kesempatan kerja". Jurnal Ekonomi pembangunan Desember tahun 2004.p 117-124
- BI. [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/7AB8DDF7-2E3D4E62data Inflasi B8D086E14C63325E/15749/APBNPenyesuaian\\_20091.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/7AB8DDF7-2E3D4E62data%20Inflasi%20B8D086E14C63325E/15749/APBNPenyesuaian_20091.pdf)(Diakses pada tanggal 16 januari 2012)
- Bogor Smart Entrepreneur.2007.<http://www.komunitasBSE.com> (diakses pada tanggal 1 Januari 2011)
- Dwi, Priyatno. *Mandiri belajar SPSS*. Yogyakarta: mediakom, 2008
- Ganis, "masalah pendidikan di Indonesia"  
[http://ganis.student.umm.ac.id/2010/01/26/mahalnya-biaya-sekolah dimasa sekarang /](http://ganis.student.umm.ac.id/2010/01/26/mahalnya-biaya-sekolah-dimasa-sekarang/) (diakses pada tanggal 27 maret 2011)
- Gujarati, Damodar. *Dasar-dasar Ekonometrika jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 2006
- Hans-Hermann Hoppe "Teori Umum Keynes Dalam Pandangan Misesian" "*The Misesian Case Against Keynes*", oleh Hans- Hermann Hoppe, Universitas Nevada, Las Vegas dan Institut Ludwig von Mises, terbit perdana dalam Dissent on Keynes: A Critical Appraisal of Keynesian Economics, disunting oleh Mark Skousen. New York: Praeger (1992).Hal. 171–198
- Hartoto, *Pengertian pendidikan*. 2009. <http://fatamorghana.wordpress.com>  
Hartoto- Pengertian-Pendidikan (diakses tanggal 7 januari 2011)
- Harian Kompas "Peluang umkm belum merata, tingkat pengangguranditentukan oleh daya tahan usaha mikro". tanggal 6 oktober2010

- Hedy, Kuswanto. “*Relevansi dunia pendidikan dalam mengantisipasi pengangguran intelektual*”. Jurnal Ekonomi tahun 2003. p 41- 44
- Imanol Nunez and Ilias Livanos, dalam jurnal ekonomi “*Higher education and unemployment in Europe: An analysis of the academic subject and national effects*” <http://www.springerlink.com> (diakses pada tanggal 22 januari 2012)
- Jan Kmenta, Elements of econometrics, edisi ke-2, macmillan, New York, 1986, p.431
- Maisaroh. Analisis “*Faktor-faktor penentu kesuksesan pendidikan Entrepreneurship*”. Kompilasi Jurnal ekonomi. 2006. p.35
- Makmuri sukarno. “*Latar belakang sosial budaya dan pencapaian pekerjaan-pendapatan*”. Jurnal kependudukan Indonesia. tahun 2006. p 29-46
- Manurung, Mandala; prathama Teori Ekonomi Makro. Jakarta: UI, 2005
- Mochammad Luthfi Nugroho, *Perekonomian Indonesia sesi 2 pengangguran terbuka pada tingkat pendidikan universitas*. 2011 <http://www.wikipedia.com/pengangguran.htm> (diakses pada 8 januari 2011)
- M. Sholahuddin, apa penyebabnya pengangguran dan sulitnya lapangan kerja <http://www.jurnal-ekonomi.org/Apa> penyebab pengangguran dan sulitnya lapangan kerja dalam perekonomian kapitalis. (Diakses pada tanggal 7 januari 2011)
- Muhammad firdaus, Ekonometrika suatu pendekatan Aplikatif, Jakarta: Bumi aksara, 2004
- Nachrowi Djalal Nachrowi, et.al, *penggunaan teknik Ekonometri*, Jakarta: Raja Garafindo Persada. 2008
- Prasodjo, Iwan. “*Pengangguran dan setengah menganggur di perkotaan*”. Jurnal SDM 1993. p 56-68
- Robby Alexander Sirait, *Urbanisasi dan Perkembangan Perkotaan di Indonesia*, 2007. <http://robbyalexandersirait.wordpress.com/2007/10/05/urbanisasi-mobilitas-dan-perkembangan-perkotaan-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 27 maret 2011)
- Sarwoko. dasar-dasar ekonometrika. Yogyakarta: ANDI. 2005

- Sudjana. Metode statistika edisi 6. Bandung : Tarsito. 2005
- S, M Endah. “*Eksistensi ukm dalam mempertahankan kelangsungan usaha pasca krisis ekonomi*”. Jurnal Ekonomi,tahun 2009 hal 15-24
- Sumarlin;iskandar syarif, “*Analisis hubungan tingkat upah tinggi terhadap pengangguran di Indonesia*”, Mepa Ekonomi: Jurnal Magister Ilmu Ekonomi.2007, p58-78
- Suryadi, Ace.”*Hubungan antara pendidikan, ekonomi dan pengangguran tenaga terdidik*. . Jurnal Ekonomi 1994
- Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi teori pengantar* . Jakarta: Raajagrafindo persada.2008.
- Sugiyono, *metode penelitian bisnis*, Jakarta: Alfabetha, 2004
- Swasono, Yudo; Silistyoningsih, Endang. *Metode perencanaan tenaga kerja*. Yogyakarta: BPFE 1987
- Tambunan, Tulus. *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- , *Usaha kecil dan menengah di Indonesia*. Jakarta: salemba empat ,2002
- Tim penulis. *Psikologi pendidikan*.Yogyakarta: FIP UNY,2000
- Triyana Iskandarsyah, “*pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Indonesia*”.p1-88
- Wing wahyu winarno.*Analisis Ekonometrika dan statistika*.Edisi kedua.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.2007

No	Provinsi	UNEMPLYM	UMP	PT
1	NAD	12.12172318	13.65299163	7.638198244
2	SUMBAR	12.303095	13.49392693	8.561784075
3	RIAU	12.18744013	13.47302025	7.626082758
4	JAMBI	11.34739023	13.39696021	7.170119543
5	BENGKULU	10.70250262	13.3767544	6.767343125
6	LAMPUNG	12.56349881	13.22672339	8.284504227
7	YOGYAKARTA	11.68584462	13.12236338	9.434123719
8	BALI	11.49583017	13.34069537	7.869019376
9	NTB	11.98113373	13.3770056	7.558516743
10	NTT	11.33341595	13.30468493	7.312553498
11	KALBAR	11.95042527	13.23569206	7.263329617
12	KALSEL	11.67185897	13.5211395	7.46221494
13	KALTENG	10.91951502	13.40900441	6.745236349
14	KALTIM	11.99488854	13.54958998	7.509883061
15	MALUKU	11.24430064	13.36138028	6.929516771
16	MALUT	10.42726889	13.39999511	6.472346295
17	GORONTALO	10.29068685	13.23569206	6.561030666
18	SULUT	11.86108627	13.52782849	7.37337431
19	SULTRA	11.13734435	13.36922346	7.895436007
20	SULTENG	11.2621923	13.32937755	7.061334367
21	PAPUA	10.91728605	13.80242532	6.954638865
22	NAD	12.0068165	13.81551056	7.812378206
23	SUMBAR	12.23921724	13.59236701	8.800264651
24	RIAU	12.24975933	13.59236701	7.837554361
25	JAMBI	11.21481588	13.49254667	7.429520843
26	BENGKULU	10.41286212	13.44444688	6.950814768

27	LAMPUNG	12.34752012	13.3326243	8.543835122
28	YOGYAKARTA	11.69345375	13.28107507	7.911324019
29	BALI	11.46700717	13.43373756	8.048468744
30	NTB	11.58798655	13.50079981	7.558516743
31	NTT	11.31161679	13.38472764	8.125039097
32	KALBAR	11.85339684	13.3770056	7.513163545
33	KALSEL	11.68160438	13.62313867	7.676937146
34	KALTENG	8.54907938	13.54876511	6.943122423
35	KALTIM	11.86713938	13.6985879	7.699842407
36	MALUKU	11.02240888	13.45883561	7.081708586
37	MALUT	10.28663888	13.45883561	6.697034248
38	GORONTALO	10.30256564	13.30468493	6.745236349
39	SULUT	11.76990603	13.64709191	8.146419323
40	SULTRA	10.97255087	13.45883561	7.539027056
41	SULTENG	9.087381465	13.41503299	7.340186835
42	PAPUA	10.84210713	13.91580828	7.177018766
43	NAD	12.06464732	13.99783211	9.071193241
44	SUMBAR	12.05671961	13.68767719	9.982437356
45	RIAU	12.23791525	13.71192624	8.872066513
46	JAMBI	11.15420557	13.59236701	8.129174997
47	BENGGULU	10.7375699	13.50762578	8.034955025
48	LAMPUNG	12.34992188	13.4458951	9.242517104
49	YOGYAKARTA	11.71971197	13.45883561	10.92565067
50	BALI	11.00882716	13.54107371	8.903543436
51	NTB	9.433003808	13.6321885	8.365439636
52	NTT	8.78201597	13.49392693	8.786303878
53	KALBAR	11.75340586	13.46595308	8.41803562

54	KALSEL	11.68187468	13.74293987	8.394347361
55	KALTENG	10.79973883	13.67979278	7.820439515
56	KALTIM	12.01422789	13.76946662	8.724369949
57	MALUKU	11.02180442	13.56061831	7.439559309
58	MALUT	10.27907748	13.55414579	7.439559309
59	GORONTALO	10.06172985	13.42246797	8.327967858
60	SULUT	11.64857461	13.74240209	8.498621806
61	SULTRA	10.87931055	13.55414579	8.513787398
62	SULTENG	11.05333147	13.48700649	8.313852267
63	PAPUA	10.71492875	14.01115957	8.018296139

DATA UPAH MINIMUM TAHUN 2006 s/d 2009

Tahun 2006			Kenaikan UMP (%)	Tahun 2007			Kenaikan UMP (%)	Tahun 2008			Kenaikan UMP (%)	Tahun 2009			Kenaikan UMP (%)
UMP (%)	KHL (%)	UMP/KHL (%)		UMP (%)	KHL (%)	UMP/KHL (%)		UMP (%)	KHL (%)	UMP/KHL (%)		UMP (%)	KHL (%)	UMP/KHL (%)	
820,000.00	775,000.00	105.81	32.26	850,000.00	920,000.00	92.39	3.66	1,000,000.00	1,200,000.00	83.33	17.65	1,200,000.00	1,400,000.00	85.71	20.00
737,794.00	737,794.00	100.00	22.97	761,000.00	714,336.63	106.53	3.15	822,205.00	783,000.00	105.01	8.04	905,000.00	955,124.00	105.83	10.07
650,000.00	668,678.00	97.21	20.37	725,000.00	760,000.00	95.39	11.54	800,000.00	871,000.00	91.85	10.34	880,000.00	896,920.00	98.11	10.00
637,000.00	870,625.00	73.17	15.50	710,000.00	774,122.00	91.72	11.46	800,000.00	815,665.00	98.08	12.68	901,600.00	1,022,669.00	88.16	12.70
760,000.00	991,237.00	76.67	36.45	805,000.00	943,254.00	85.34	5.92	833,000.00	923,050.00	90.24	3.48	892,000.00	1,022,000.00	87.28	7.08
563,000.00	571,142.00	98.57	16.08	658,000.00	693,000.00	94.95	16.87	724,000.00	734,169.24	98.61	10.03	800,000.00	918,121.00	87.13	10.50
604,000.00	853,000.00	70.81	19.91	662,000.00	753,000.00	87.92	9.60	743,000.00	1,100,000.00	67.55	12.24	824,730.00	929,642.00	88.71	11.00
640,000.00	714,000.00	89.64	14.29	720,000.00	830,000.00	86.75	12.50	813,000.00	978,720.00	83.07	12.92	850,000.00	1,237,000.00	68.71	4.55
516,000.00	586,000.00	88.05	20.00	644,838.00	644,000.00	100.13	24.97	690,000.00	714,750.00	96.54	7.00	735,000.00	742,498.95	98.99	6.52
505,000.00	589,540.00	85.66	24.69	555,000.00	554,521.00	100.09	9.90	617,000.00	650,000.00	94.92	11.17	691,000.00	805,308.00	85.81	11.99
447,654.28	542,621.00	82.50	9.65	516,840.00	607,425.44	85.09	15.46	568,193.39	614,275.42	92.50	9.94	628,191.15	731,680.00	85.86	10.56
819,100.00	831,336.00	98.53	15.07	900,560.00	991,988.00	90.78	9.95	972,604.80	1,055,275.60	92.17	8.00	1,069,865.00	1,314,059.07	81.42	10.00
661,613.00	735,126.00	90.00	13.10	746,500.00	764,214.00	97.68	12.83	837,000.00	851,500.00	98.30	12.12	917,500.00	917,638.00	99.96	9.62
450,000.00	582,128.00	77.30	15.38	500,000.00	586,219.83	85.29	11.11	547,000.00	612,222.62	89.35	9.40	575,000.00	793,693.96	72.45	5.12
460,000.00	673,518.00	68.30	15.00	500,000.00	656,976.00	76.11	8.70	586,000.00	687,132.00	85.28	17.20	700,000.00	820,484.00	85.32	19.45
390,000.00	580,054.00	67.24	14.71	448,500.00	458,755.00	97.76	15.00	500,000.00	544,157.00	91.89	11.48	570,000.00	706,698.00	80.66	14.00
510,000.00	742,054.00	68.73	13.97	622,000.00	704,000.00	88.35	21.96	682,650.00	711,099.00	96.00	9.75	760,000.00	956,339.00	79.47	11.33
550,000.00	570,000.00	96.49	15.79	645,000.00	643,557.00	100.22	17.27	730,000.00	727,682.00	100.32	13.18	832,500.00	860,000.00	96.80	14.04
550,000.00	670,560.00	82.02	22.22	600,000.00	735,000.00	81.63	9.09	650,000.00	782,466.00	83.07	8.33	725,000.00	909,000.00	79.76	11.54
512,000.00	605,017.00	84.63	15.00	560,000.00	721,564.00	77.61	9.38	645,000.00	776,928.00	83.02	15.18	705,000.00	803,914.00	87.70	9.30
629,000.00	684,319.00	91.92	17.29	745,000.00	768,000.00	97.01	18.44	825,000.00	790,000.00	104.43	10.74	930,000.00	947,000.00	98.20	12.73
634,260.00	850,000.00	74.62	21.11	665,973.00	753,093.00	88.43	5.00	765,868.00	825,000.00	92.83	15.00	873,089.00	910,670.00	95.87	14.00
701,640.00	764,756.00	91.75	16.94	766,500.00	882,797.00	86.83	9.24	889,654.00	935,440.00	95.11	16.07	955,000.00	1,209,870.00	78.93	7.35
575,000.00	1,076,699.00	53.40	15.00	635,000.00	1,091,195.00	58.19	10.43	700,000.00	1,182,556.00	59.19	10.24	775,000.00	1,280,599.00	60.52	10.71
528,000.00	926,286.00	57.00	20.00	660,000.00	1,475,035.00	44.74	25.00	700,000.00	1,090,127.00	64.21	6.06	770,000.00	1,520,000.00	50.66	10.00
527,000.00	677,162.00	77.82	21.15	590,000.00	599,080.00	93.48	6.26	600,000.00	798,852.00	75.11	7.14	675,000.00	889,000.00	75.93	12.50
713,500.00	691,224.00	103.22	18.92	750,000.00	705,000.00	106.38	5.12	845,000.00	802,035.00	105.36	12.67	929,500.00	863,731.00	107.61	10.00
573,400.00	573,400.00	100.00	15.00	640,000.00	653,250.00	97.97	11.61	700,000.00	640,000.00	109.38	9.38	770,000.00	823,638.00	93.49	10.00
575,000.00	615,000.00	93.50	17.35	615,000.00	635,000.00	96.85	6.96	670,000.00	733,000.00	91.41	8.94	720,000.00	915,000.00	78.69	7.46
612,000.00	672,650.00	90.98	20.00	673,200.00	677,333.00	99.39	10.00	740,520.00	754,884.00	98.10	10.00	905,000.00	1,154,080.00	78.42	22.21
612,000.00	672,650.00	90.98	-	691,464.00	886,493.00	78.00	12.98	760,500.00	850,000.00	89.47	9.98	909,400.00	1,120,000.00	80.76	19.58
822,500.00	941,099.00	87.40	17.50	987,000.00	941,000.00	104.89	20.00	1,105,500.00	1,638,746.00	67.46	12.01	1,216,100.00	1,734,054.00	70.13	10.00
-	-	-	-	-	-	-	-	1,105,500.00	1,638,746.00	67.46	-	1,180,000.00	1,325,842.69	89.00	6.74
602,701.92	719,833.59	84.81	18.47	672,480.47	766,350.43	89.81	11.92	745,709.22	849,179.12	89.79	10.89	841,529.55	1,010,371.93	84.91	11.29

Direktorat  
Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

**TABEL / TABLE : 17**  
**PERKEMBANGAN JUMLAH LULUSAN NEGERI DAN SWASTA TIAP PROVINSI**  
**TREND OF PUBLIC AND PRIVATE GRADUATES BY PROVINCE**  
**PERGURUAN TINGGI (PT) / HIGHER EDUCATION (HE)**  
**TAHUN / YEAR : 2006/2007-2008/2009**

PT 06/09

No. Provinsi Province	2006/2007			2007/2008			2008/2009		
	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
1 DKI Jakarta	7,714	28,781	36,495	37,621	42,057	79,678	139,345	71,326	210,671
2 Jawa Barat	7,376	19,298	26,674	7,473	28,199	35,672	17,147	47,623	64,770
3 Banten	805	2,230	3,035	825	3,259	4,074	588	5,431	6,019
4 Jawa Tengah	4,740	14,902	19,642	4,774	21,776	26,550	16,205	37,092	53,297
5 DI Yogyakarta	2,938	15,570	18,508	2,977	22,751	25,728	16,914	38,670	55,584
6 Jawa Timur	10,039	17,178	27,217	10,170	25,302	35,272	23,566	42,490	66,056
7 Nanggroe Aceh Darussalam	1,256	820	2,076	1,275	1,198	2,473	6,653	2,048	8,701
8 Sumatera Utara	3,312	9,690	13,002	3,356	14,380	17,736	12,153	23,872	36,025
9 Sumatera Barat	2,240	2,988	5,228	2,270	4,366	6,636	14,266	7,377	21,643
10 R i a u	1,036	1,015	2,051	1,050	1,484	2,534	4,639	2,491	7,130
11 Kepulauan Riau	-	401	401	-	586	586	-	584	584
12 Jambi	477	823	1,300	483	1,202	1,685	1,426	1,966	3,392
13 Sumatera Selatan	1,685	4,134	5,819	1,708	6,040	7,748	4,037	10,106	14,143
14 Bangka Belitung	-	320	320	-	468	468	-	786	786
15 Bengkulu	506	367	869	513	531	1,044	2,386	901	3,087
16 Lampung	1,461	2,501	3,962	1,480	3,655	5,135	4,281	6,046	10,327
17 Kalimantan Barat	567	860	1,427	575	1,237	1,812	2,444	2,084	4,528
18 Kalimantan Tengah	461	389	850	467	569	1,036	1,536	955	2,491
19 Kalimantan Selatan	863	878	1,741	875	1,283	2,158	2,344	2,078	4,422
20 Kalimantan Timur	1,025	801	1,826	1,038	1,170	2,208	4,177	1,974	6,151
21 Sulawesi Utara	999	594	1,593	1,012	868	1,880	3,451	1,457	4,908
22 Gorontalo	409	298	707	414	436	850	3,411	727	4,138
23 Sulawesi Tengah	364	802	1,166	369	1,172	1,541	2,087	1,993	4,080
24 Sulawesi Selatan	2,447	6,106	8,553	2,479	8,922	11,401	10,582	14,944	25,526
25 Sulawesi Barat	-	160	160	-	235	235	-	396	396
26 Sulawesi Tenggara	1,119	1,566	2,685	1,134	2,288	3,422	1,059	3,924	4,983
27 Maluku	676	346	1,022	685	505	1,190	1,926	843	2,769
28 Maluku Utara	304	343	647	308	502	810	860	842	1,702
29 Bali	1,546	1,069	2,615	1,566	1,563	3,129	4,714	2,644	7,358
30 Nusa Tenggara Barat	610	889	1,499	618	1,299	1,917	2,169	2,127	4,296
31 Nusa Tenggara Timur	649	1,861	2,510	658	2,720	3,378	1,920	4,624	6,544
32 Papua	499	549	1,048	506	803	1,309	1,705	1,331	3,036
33 Papua Barat	161	841	1,002	163	1,229	1,392	370	2,051	2,421
<b>Indonesia</b>	<b>58,284</b>	<b>139,366</b>	<b>197,650</b>	<b>68,838</b>	<b>283,655</b>	<b>352,493</b>	<b>388,161</b>	<b>344,283</b>	<b>652,364</b>

TABEL / TABLE : 23  
 PERKEMBANGAN JUMLAH LULUSAN NEGERI DAN SWASTA TIAP PROVINSI  
 TREND OF PUBLIC AND PRIVATE GRADUATES BY PROVINCE  
 SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)  
 TAHUN / YEAR : 2007/2008–2009/2010

SMA09/10

No. Provinsi Province	2007/2008			2008/2009			2009/2010		
	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
1 DKI Jakarta	29,975	31,561	61,536	27,104	31,625	58,729	27,580	33,606	61,186
2 Jawa Barat	77,747	62,093	139,840	81,114	63,267	144,381	91,089	68,861	159,950
3 Banten	16,393	16,515	32,908	20,354	17,354	37,708	22,827	17,276	40,103
4 Jawa Tengah	75,435	45,451	120,886	78,076	49,918	127,994	82,513	47,005	129,518
5 DI Yogyakarta	11,711	8,203	19,914	11,440	7,318	18,758	11,139	5,881	17,020
6 Jawa Timur	77,973	56,017	133,990	81,871	58,383	140,254	87,557	65,202	152,759
7 Aceh	26,164	3,803	29,967	28,062	4,029	32,091	35,749	4,212	39,961
8 Sumatera Utara	44,040	49,942	93,982	48,193	48,569	96,762	50,061	52,322	102,383
9 Sumatera Barat	25,971	5,132	31,103	26,921	4,869	31,790	28,384	5,238	33,622
10 Riau	17,945	6,332	24,277	19,789	6,453	26,242	21,554	7,078	28,632
11 Kepulauan Riau	3,879	748	4,627	4,321	834	5,155	5,282	1,164	6,446
12 Jambi	11,159	2,789	13,948	12,018	3,248	15,266	13,796	3,364	17,160
13 Sumatera Selatan	23,447	21,720	45,167	25,158	20,734	45,892	26,125	21,323	47,448
14 Bangka Belitung	3,115	1,966	5,081	3,456	1,722	5,178	4,379	2,002	6,381
15 Bengkulu	8,122	1,678	9,800	8,615	1,761	10,376	9,241	1,908	11,149
16 Lampung	17,643	15,476	33,119	18,553	14,777	33,330	17,798	15,264	33,062
17 Kalimantan Barat	11,106	7,528	18,634	10,975	7,685	18,660	12,410	8,353	20,763
18 Kalimantan Tengah	7,136	2,150	9,286	7,383	2,305	9,688	8,448	2,382	10,830
19 Kalimantan Selatan	9,114	2,733	11,847	8,744	2,593	11,337	9,609	2,361	11,970
20 Kalimantan Timur	11,113	5,308	16,421	11,248	5,378	16,626	13,335	4,861	18,196
21 Sulawesi Utara	8,932	4,538	13,470	9,283	4,420	13,703	9,677	4,482	14,159
22 Gorontalo	3,452	249	3,701	3,626	254	3,880	4,556	305	4,861
23 Sulawesi Tengah	8,982	2,094	11,076	9,543	2,061	11,604	11,116	1,917	13,033
24 Sulawesi Selatan	30,994	10,300	41,294	32,796	10,183	42,979	34,549	10,298	44,847
25 Sulawesi Barat	3,419	331	3,750	3,794	286	4,080	4,271	510	4,781
26 Sulawesi Tenggara	13,384	2,382	15,766	15,795	2,351	18,146	16,168	2,713	18,881
27 Maluku	9,882	5,003	14,885	10,397	5,543	15,940	11,104	5,130	16,234
28 Maluku Utara	3,586	1,745	5,331	4,228	2,174	6,402	4,251	1,913	6,164
29 Bali	13,903	9,697	23,600	14,633	9,638	24,271	16,079	8,975	25,054
30 Nusa Tenggara Barat	14,220	5,249	19,469	18,300	5,117	23,417	20,854	5,376	26,230
31 Nusa Tenggara Timur	10,781	8,863	19,644	12,013	11,395	23,408	13,031	11,487	24,518
32 Papua	5,811	4,729	10,540	5,911	4,212	10,123	6,770	4,245	11,015
33 Papua Barat	2,761	1,475	4,236	3,102	1,347	4,449	3,499	1,392	4,891
<b>Indonesia</b>	<b>639,295</b>	<b>403,800</b>	<b>1,043,095</b>	<b>676,816</b>	<b>411,883</b>	<b>1,088,619</b>	<b>734,801</b>	<b>428,406</b>	<b>1,163,207</b>

TABEL / TABLE : 23

PERKEMBANGAN JUMLAH LULUSAN NEGERI DAN SWASTA TIAP PROVINSI  
TREND OF PUBLIC AND PRIVATE GRADUATES BY PROVINCE  
SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)  
TAHUN / YEAR : 2004/2005-2006/2007

SMA06/07

No. Provinsi Province	2004/2005			2005/2006			2006/2007		
	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
1 DKI Jakarta	35,059	32,875	67,934	34,856	34,210	69,066	34,302	35,052	69,354
2 Jawa Barat	68,715	62,532	131,247	81,227	67,273	148,500	78,846	68,161	147,007
3 Banten	12,131	14,330	26,461	14,492	14,850	29,342	14,625	16,628	31,253
4 Jawa Tengah	73,486	58,585	132,071	77,666	58,482	136,148	76,595	59,511	136,106
5 DI Yogyakarta	12,026	9,596	21,622	12,328	9,306	21,634	11,542	9,637	21,179
6 Jawa Timur	72,510	64,274	136,784	77,551	70,930	148,481	76,522	70,356	146,878
7 N. Aceh Darussalam	20,985	2,964	23,949	22,421	2,940	25,361	22,992	3,437	26,429
8 Sumatera Utara	33,899	45,487	79,386	41,065	51,694	92,759	41,960	52,343	94,303
9 Sumatera Barat	23,956	5,968	29,924	26,797	6,050	32,847	26,611	6,175	32,786
10 Riau	12,975	6,975	19,950	15,508	7,521	23,029	15,835	7,058	22,893
11 Kepulauan Riau	3,056	813	3,869	3,172	791	3,963	3,296	624	3,920
12 Jambi	8,873	3,116	11,989	9,125	2,575	11,700	10,202	3,260	13,462
13 Sumatera Selatan	17,483	19,829	37,312	20,609	20,643	41,252	21,582	21,376	42,958
14 Bangka Belitung	2,243	2,331	4,574	2,901	2,364	5,265	2,741	1,842	4,583
15 Bengkulu	8,774	2,406	11,180	9,172	2,255	11,427	8,641	1,782	10,423
16 Lampung	14,774	11,321	26,095	16,460	12,921	29,381	16,638	15,421	32,059
17 Kalimantan Barat	8,108	6,450	14,558	9,367	6,139	15,506	9,626	7,041	16,667
18 Kalimantan Tengah	5,744	2,374	8,118	5,930	1,956	7,886	6,108	2,253	8,361
19 Kalimantan Selatan	8,778	3,685	12,463	8,882	3,883	12,765	9,395	3,049	12,444
20 Kalimantan Timur	8,712	4,444	13,156	10,094	4,840	14,934	10,559	4,918	15,477
21 Sulawesi Utara	8,057	4,569	12,626	8,295	4,317	12,612	8,896	4,516	13,412
22 Gorontalo	2,837	184	3,021	3,188	261	3,449	2,913	270	3,183
23 Sulawesi Tengah	7,555	2,171	9,726	8,681	1,695	10,376	8,876	1,795	10,669
24 Sulawesi Selatan	31,114	11,490	42,604	35,433	11,016	46,449	35,007	11,661	46,668
25 Sulawesi Barat	2,510	320	2,830	3,297	312	3,609	3,107	341	3,448
26 Sulawesi Tenggara	10,597	2,031	12,628	11,899	1,878	13,777	12,178	2,114	14,292
27 Maluku	7,717	3,725	11,442	9,604	3,531	13,135	8,963	4,696	13,659
28 Maluku Utara	3,361	1,775	5,136	3,087	1,585	4,672	3,334	1,975	5,309
29 Bali	10,716	7,945	18,661	14,222	9,039	23,261	14,098	9,984	24,082
30 Nusa Tenggara Barat	13,853	6,472	20,325	15,757	6,944	22,701	14,176	6,892	21,068
31 Nusa Tenggara Timur	8,313	7,983	16,296	9,744	8,467	18,211	9,360	9,455	18,815
32 Papua	4,417	2,785	7,202	4,694	3,853	8,547	4,739	4,278	9,017
33 Papua Barat	1,977	1,531	3,508	2,426	1,721	4,147	2,469	1,521	3,990
<b>Indonesia</b>	<b>965,311</b>	<b>413,346</b>	<b>978,657</b>	<b>629,350</b>	<b>436,242</b>	<b>1,065,592</b>	<b>626,734</b>	<b>449,420</b>	<b>1,076,154</b>

## Perhitungan Regresi dan Asumsi klasik

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.356 <sup>a</sup>	.127	.097	.82541	1.550

a. Predictors: (Constant), PT, UMP

b. Dependent Variable: UNEMPLYM

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.922	2	2.961	4.346	.017 <sup>a</sup>
	Residual	40.878	60	.681		
	Total	46.800	62			

a. Predictors: (Constant), PT, UMP

b. Dependent Variable: UNEMPLYM

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.198	7.827		1.175	.245
	UMP	-.061	.590	-.013	-.103	.918
	PT	.367	.126	.358	2.905	.005

a. Dependent Variable: UNEMPLYM

**Correlations**

		UNEMPLYM	UMP	PT
UNEMPLYM	Pearson Correlation	1	.061	.356**
	Sig. (2-tailed)		.638	.004
	N	63	63	63
UMP	Pearson Correlation	.061	1	.204
	Sig. (2-tailed)	.638		.108
	N	63	63	63
PT	Pearson Correlation	.356**	.204	1
	Sig. (2-tailed)	.004	.108	
	N	63	63	63

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Tests of Normality**

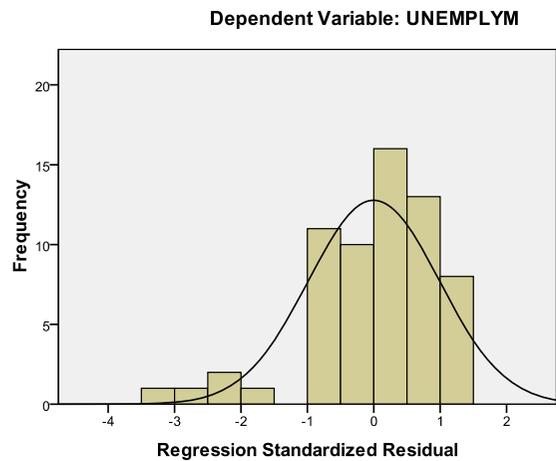
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
UNEMPLYM	.116	63	.036	.916	63	.000
UMP	.096	63	.200*	.970	63	.125
PT	.075	63	.200*	.952	63	.016

a. Lilliefors Significance Correction

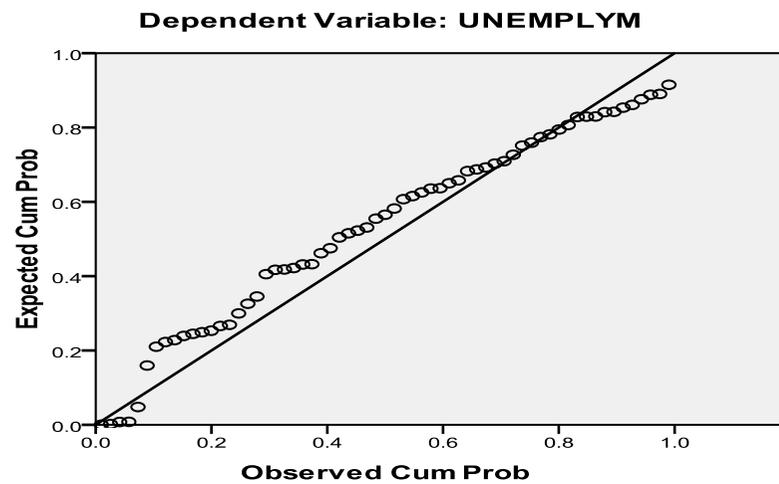
\*. This is a lower bound of the true significance.

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	UMP	.958	1.044
	PT	.958	1.044

Histogram

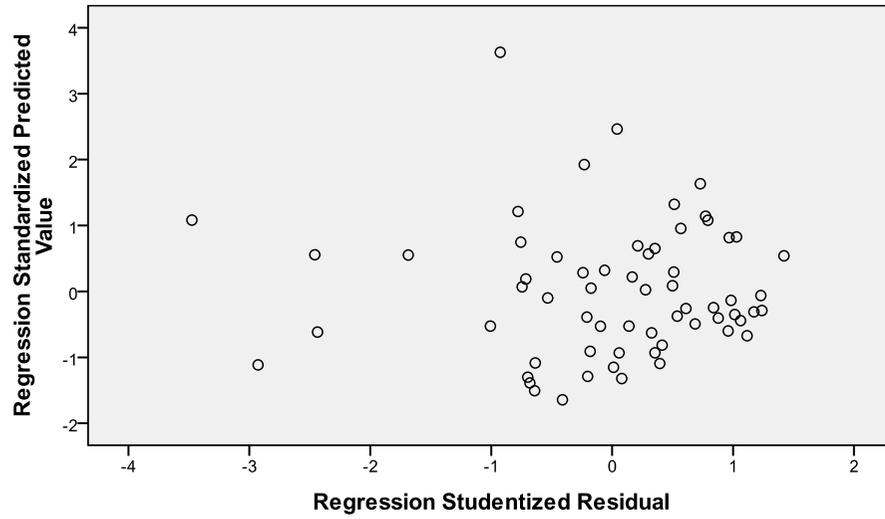


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



**Scatterplot**

**Dependent Variable: UNEMPLYM**



uji heteroskedastisitas